

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam penerapan *Collaborative Governance* dalam penanganan *shelter* bagi penyintas terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menekankan pada beberapa hal diantaranya:
 - a. Ketidaksesuaian Kebijakan Pemerintah Pusat dengan tujuan dari *Collaborative Governance* melalui Klaster Nasional (Sub-Klaster *Shelter*), dalam upaya pemenuhan kebutuhan *shelter* bagi penyintas di Nusa Tenggara Barat, sehingga beberapa kebijakan ada (di tingkat nasional), menjadi menghambat proses percepatan penanganan *shelter* di Nusa Tenggara Barat.
 - b. Kapasitas dan latar belakang yang beragam dari aktor kolaboratif untuk penanganan *shelter* di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadikan upaya percepatan penanganan menjadi lambat.
 - c. Pelibatan kelompok-kelompok masyarakat lokal (tokoh agama, tokoh masyarakat) dalam program dukungan *shelter* masih terbatas, sehingga aksi kolaborasi belum mengoptimalkan partisipasi lokal.
 - d. Keterlibatan masyarakat penerima manfaat *shelter* dalam aspek komunikasi multi arah masih terbatas pada sumbang saran bukan pada pengambilan keputusan.
 - e. Adanya kendala-kendala teknis dilapangan, seperti data penerima bantuan (data ganda/tidak terdata), lokasi relokasi, pelibatan penyintas dalam program *shelter* dan lain-lain, yang mengharuskan advokasi kepada pemerintah daerah.
 - f. Adanya dikotomi terkait sistem penanganan terpadu yang dikembangkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini

menyebabkan unsur non-pemerintah merasa belum banyak dilibatkan untuk proses hunian sementara.

2. Secara umum *Collaborative Governance* dalam penanganan *shelter* bagi penyintas terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah dapat dan berhasil dilakukan dengan mengacu pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Konsensus Bersama dalam penanganan *shelter* bagi korban penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya komitmen dan tujuan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, baik consensus pada level pusat maupun consensus pada level daerah. Namun demikian, masih ditemui adanya perbedaan kebijakan pusat dan daerah terkait dengan pembangunan *shelter* bagi penyintas korban bencana gempa bumi di provinsi NTB;
 - b. Aspek Kepemimpinan Kolektif dalam penanganan *shelter* bagi korban penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB berdasarkan hasil penelitian ini ditunjukkan dengan diaktifkannya Sub Klaster *Shelter* yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial sebagai wakil pemerintah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan penanganan *shelter* dengan melibatkan seluruh aktor yang terlibat (unsur pemerintah, non pemerintah dan penerima manfaat) dalam pengambilan keputusan penanganan *shelter* di provinsi NTB;
 - c. Aspek Komunikasi Multipihak dalam penanganan *shelter* bagi korban penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB sesuai hasil penelitian ini telah dilakukan dengan diaktifkannya pos komando penanggulangan bencana di provinsi NTB sebagai ruang interaksi, komunikasi dan berbagi informasi antar-aktor, khususnya actor penanganan *shelter* bagi penyintas korban gempa bumi di Provinsi NTB. Namun demikian masih lemahnya peran kelembagaan lain diantaranya Platform Nasional PRB ataupun Forum Pengurangan

Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat seharusnya dapat mengambil peran lebih banyak, khususnya dalam penanganan respon bencana, dengan mempertimbangkan posisi strategis yang dimiliki.

- d. Aspek Berbagi Sumberdaya dalam penanganan shelter bagi korban penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB ditunjukkan dengan pembagian peran dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik masing-masing actor yang terlibat, serta saling bekerjasama dalam melengkapi kekurangan diantara actor-aktor yang terlibat dalam penanganan shelter bagi korban penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti, berdasar kesimpulan yang ada adalah:

1. Penerapan model *Collaborative Governance* penanganan *shelter* bagi penyintas terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di adopsi menjadi model kebijakan penanganan *shelter* bagi penyintas terdampak bencana di Indonesia dengan melakukan penyesuaian berdasarkan karakteristik risiko bencana dan budaya setempat.
2. Dalam rangka memperkuat upaya membangun konsensus bersama antar pihak, khususnya dalam penanganan shelter bagi korban penyintas bencana diperlukan kebijakan terintegrasi dan didasarkan atas kebutuhan riil dilapangan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan kebijakan dana atau overlap kebijakan di tingkat pusat dan daerah;
3. Dari hasil penelitian ini diketahui adanya faktor budaya dalam penanganan bencana di Provinsi NTB, untuk itu diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap keterlibatan aktor-aktor lokal, khususnya dalam layanan dukungan shelter;

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal (2016) Kebijakan Publik, Salemba Humanika, Jakarta.
- Ansell, C, & Gash, A. (2007) *Collaborative Governance* in Theory and Practice, Journal of Administration Research and Theory, 18, 543-571. doi:10.1093/jopart/mum032
- Ansell, Christopher, 2014, Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy, New York: Oxford University Press, Inc.
- Arrozaaq, Dimas L.C., (2016). *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo), Sec.pdf (unair.ac.id)
- BNPB, Data Induk Bencana Indonesia (DIBI) 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2018.
- BNPB, Indeks Risiko Bencana Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2018.
- Cahyaningrum, dkk, Kaleidoskop Bencana 2018, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM Yogyakarta.
- Carter, W.N. Disaster Management (A Disaster Manager's Handbook). Asian Development Bank, Philipines, 1991.
- Cline, K. D. (2000). Defining the Implementation Problem: Organizational Management versus Cooperation. Journal of Public Administration Research and Theory, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024281>
- Chaplyn, J., Sharon Fraser, S. & Ryan, L., (2020). *Collaborative Governance*. An introductory practice guide. CFI Report. June 2020 ; Collaborative Governance Guide June 2020.pdf (platformmc.org)
- Daswati dkk. *Collaborative Governance* in the management of Integrated Community Shelters post disaster (ICS) in the City of Palu (2019), atrikel yang diterbitkan oleh Universitas Tadulako, Palu.
- Donahue, John D. & Richard J. Zeckhauser, 2011, *Collaborative Governance: private roles for public goals in turbulent times*, New Jersey: Princeton University Press.
- Doty Damayanti, Manajemen Bencana (Mendorong Mitigasi Berbasis Risiko), diunduh tanggal 28 April 2020 dari: <http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/09543340/>.

- Dwi Agustina, Kolaborasi Pemerintah DIY dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Yogyakarta.
- Efendi, K. C., & Sumiar, H. R. (2019). *Sengkarut Tata Kelola Bencana dan Upaya Penyelesaiannya*. 0274, 20.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for *Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fauzi Ahmad, 2019, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Penanggulangan Bencana, Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (e-ISSN: 2477- 0574; p-ISSN: 2477-3824) Vol. 04, Issue. 03, September 2019
- Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi), II, 200– 208.
- Frederickson George, H. *Administrasi Negara Baru*, LP3ES, Jakarta, 2003
- Gray Barbara, Collaborating: Finding common ground for multi-party problems. (San Francisco,CA: Jossey-Bass, 1989)
- IABI, National Disaster Response Framework (NDRF), Ikatan Ahli Bencana Indonesia tahun 2017
- Ilmagi, I. (2019). Menyelami Bencana Alam Dengan Gizi Bencana. *Ilmagi Indonesia*, 19(2), 1–198. <https://www.ilmagiindonesia.org/menyelami-bencana-alam-dengan-gizi-bencana/>
- Irawan, D. (2016). (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya), 1–11.
- Jauhar Fajrin dkk, PENGEMBANGAN DESAIN HUNIAN SEMENTARA UNTUK KORBAN GEMPA LOMBOK Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Volume 3 No. 2 | Februari 2020: Hal :103-109.
- Katz, Saul M., A System Approach to Development Administration: A Framework for Analysing capability of Action for National Development, University of Virginia, Didigitalkan 2 Okt 2008
- Kemenko PMK RI (2017), Pedoman Koordinasi Penanganan Darurat Bencana.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 313.
- Krisna S. Pribadi dkk (2018), Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok, Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB Bandung Jawa Barat 40132

- Lee, S.-Y., & Whitford, A. B. (2013). Assessing the Effects of Organizational Resources on Public Agency Performance: Evidence from the US Federal Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 23(3), 687–712.
- Martin, G. P., Currie, G., & Finn, R. (2009). Leadership, Service Reform, and Public-Service Networks: The Case of Cancer-Genetics Pilots in the English NHS. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(4), 769–794.
- Morse, Ricardo S; John B Stephens. 2012.” Teaching *Collaborative Governance*: Phases, Competencies, and Case-Based Learning”. *Journal of Public Affairs Education*. 18(3). 565-584.
- Muhammad, Surya R & Nurkholis, A., (2015). Panduan Inisiasi dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Daerah. Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana & BNPB.
- Nasrul Haq, Nilai Dasar *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik Jurnal Administrasi Publik, Desember 2020, Volume 6, Nomor 3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
- Newman, Janet; Barnes, Marian; Sullivan, Helen and Knops, Andrew, 2004, Public “Participation and *Collaborative Governance*”. *Journal of Social Policy*. 33 (2). hh. 203-223
- Novita, A. A., Brawijaya, U., & Timur, J. (2018). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) *Collaborative Governance* dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan, 4(1), 27–35.
- Olimpiade, P., & Tulis, K. (2009). Proceeding Olimpiade Karya Tulis Inovatif (OKTI) 2009, 1–14.
- Permana, O. R. (n.d.). Mengubah paradigma penanganan bencana di Indonesia PMI, Panduan Shelter Untuk Kemanusiaan, Edisi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh (2019)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia
PUSLITBANG KMP LAN, Laporan Kajian Manajemen Bencana 2019
- Sagala, S., Situngkir, F., & Wimbarda, R. (2019). Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pascabencana Gempa Bumi, 29(2), 217–226.
- Samad M. dkk (2020). *Collaborative Governance* in the Management of Integrated Community Shelters Post Disaster (ICS) in the City of Palu Political Science Review, 5 (2), August 2020, pp. 229-242 Universitas Tadulako, Indonesia

STIA LAN Jakarta, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Buku Panduan STIA LAN Jakarta 2017.

Sudarmo. 2011. Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media.

diunduh tanggal 2 Maret 2021 dari: <http://google-cendekia/24039-49185-1-SM%20.pdf>

Sugiyono, Prof. (2015). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Muhammad, Surya R; Nurkholis, Arif. (2015). Panduan Inisiasi dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Daerah. BNPB

WEBSITE

Abidin, <http://eprints.umm.ac.id/39310/3/bab%202.pdf> diakses tanggal 5 Maret 2021

About Disaster Management, Maret 2017, <http://www.ifrc.org/en/what-wedo/disaster-management/about-disaster-management/>, diakses tanggal 4 Maret 2021

Arrozaaq, Dimas L.C., (2016). *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo), [Sec.pdf \(unair.ac.id\)](http://unair.ac.id)

BNPB, (2019). Sinergitas Pentahelix Dalam Mitigasi Bencana. Diakses dari <https://bnpb.go.id/sinergitas-pentahelix-dalam-mitigasi-bencana> pada 15 April 2021

JDIHSetneg.https://www.jdih+setneg&rlz=1C1CHBD_enID772ID775&oq=JDIH+&aqs=chrome.1.69i57j0i131i433j0i433j0j0i131i433l2j69i60l2.6483j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses tanggal 4 Maret 2021

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2020), Minimalkan Dampak Risiko Bencana, Pemprov NTB Bentuk FPRB, diakses dari <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/minimalkan-dampak-risiko-bencana-pemprov-ntb-bentuk-fprb> pada 19 april 2021

UNDP, 2009. Lesson Learned: Disaster Management Legal Reform. Indonesian Experience, <http://www.preventionweb.net/publications/view/10468> , diakses tanggal 15 Februari 2021

DPR-RI, Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. B. Analisis Keterkaitan Peraturan terkait Penanggulangan. Bencana. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen> diakses tanggal 15 Februari 2021.

<https://www.pelajaran.co.id/2017/06/pengertian-pembangunan-konsep-dan-teori-serta-contoh-pembangunan.,>

[#~:text=Plan as%20PRB%20secara%20formal%20didirikan%20pada%20bulan%20April,pemerintah%20dan%20para%20pemangku%20kepentingan%20penanggulangan%20bencana%205. Diakses pada 21 April 2021](https://www.academia.edu/35480697/STATUTA_PLATFORM_NASIONAL_PENGURANGAN_RISIKO_BENCANA_PLANAS_PRB)

<https://nasional.tempo.co/read/1119595/kurang-koordinasi-penyebab-bantuan-gempa-lombok-tidak-merata. Diakses pada 25 Juni 2021>



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Surat Ijin Penelitian

 POLITEKNIK TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER JAKARTA	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA Jl. Administrasi XI Pejaganongan, Jakarta Pusat 10240 Telp. (021) 452 0000, Fax. (021) 452 0001 Email: politeknik@staan.ac.id www.staan.ac.id
Nomor : 4004/PTA.I/1/PPB.02.3 Tanggal : 05/07/2011 Lampiran : Prospekt Pendidikan Tinggi Hal : 1 Program Studi : Administrasi Pemerintahan Melayu Program Magister : Tropen Dosen Pembimbing : Dr. H. M. S. Hadi Dosen Pendamping : Dr. H. M. S. Hadi	
Jakarta, 5 April 2011	
VII. Sistem Pendidikan dan Sistem Kerja Revisi Atas Keputusan Dosen	
Jakarta	
Berdasarkan surat kerja ketua inti mahasiswa, bahwa selaku netra mahasiswa kami :	
Nama : Silviana Harlap NIM : 136102010213 Jurusan : Administrasi Publik Program Studi : Administrasi Pemerintahan Negara Kode Kelas : ADM 101 Kode Mata Kuliah : ADM 101 Judul Proses : Administrasi Pemerintahan Negara Tercantum Beserta Gengsi Duta Di Prosesa Siswa Tenggara	Berdasarkan ketua inti mahasiswa, bahwa selaku netra mahasiswa kami :
Silviana Harlap 136102010213 Administrasi Publik Administrasi Pemerintahan Negara ADM 101 ADM 101 Administrasi Pemerintahan Negara Tercantum Beserta Gengsi Duta Di Prosesa Siswa Tenggara	
akhir berlakukannya peraturan dalam rangka pengelolaan resepsi di kantor Politeknik ITS Selanjutnya ditulis di bawah ini, kami selaku perwakilan Politeknik ITS menyatakan jalin dan memahami, bahwa kita merasa sepatutnya mendapatkan sebuah halaman administrasi/infotainment yang Atas perkenan, sumbang dan kerjasama Politeknik ITS, kami sepuhnya terima kasih.	
 ITS Dr. H. M. S. Hadi Dosen Pembimbing Politeknik STIA LAN Jakarta	
Revisi Atas 1. Direktorat Politeknik ITIA (LTA) Jakarta; 2. Direktorat Politeknik STIA LAN Jakarta; 3. Kepala Administrasi Politik; 4. Kepala Program Magister Tropen.	

POLITEKNIK
STIA LAN
T A X I C A R
L A N

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN KARAKTA
 Lt. Administrasi II Pejagalan, Jakarta Pusat 10230
 Telp. 334785, 529846, 529206, Fax 3363178, 5299666
 Email: polstian@polstian.ac.id, www.polstian.ac.id

Nomor : 468/PTIA/1/PP/05.2.3
 Tanggal : Jakarta, 5 April 2021

Lampiran :
 - Proposal Penelitian
 - Rancangan Penyelesaian Mahasiswa
 Program Magister Tropen
 Politeknik STIA LAN Jakarta

Th. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Tenggara Barat

Mataram

Bersamaan dengan hormat kami informasikan, bahwa selaku serta mahasiswa kami :

Nama : Selvina Harapit
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Administrasi Pemerintahan Negara
 Konsentrasi : Kebijakan Pemerintahan
 Mahasiswa : Selvina Harapit Propanagnan Shuber Bagi Pengajuan
 Terdirikan Dengan Benar Di Provinsi Banten Tenggara Barat

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian tesis di Institut Himpunan Hapez.

Sehingga dengan itu, kami mohon perbaikan dan/atau intruksinya (jika ada) sebaiknya bertujuan memperbaiki seluruh hal-hal teknis/tentative yang diterimakan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Hapez, Bapak/Ibu kami terimakasih terlebih.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN KARAKTA
 Lt. Administrasi II Pejagalan, Jakarta Pusat 10230
 Telp. 334785, 529846, 529206, Fax 3363178, 5299666
 Email: polstian@polstian.ac.id, www.polstian.ac.id

1. Diketahui
 2. Diketahui
 3. Boleh
 4. Kepada

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Hapez, Bapak/Ibu kami terimakasih terlebih.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 3 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON 3459444 (HUNTING), FAXIMILE 3453768

WEBSITE: <http://www.kemenkopmk.go.id> - email: informasi@kemenkopmk.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 115 /Ro.Um/PEG.03.02/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Suwarni
NIP : 19670806 199301 2 001
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nelwan Harahap
NIP : 19691121 199603 1 003
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana

Telah selesai melakukan penelitian di Jakarta, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat melalui instrument observasi, wawancara dan studi pustaka guna mendapatkan data/informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Collaborative Governance Penanganan Shelter Bagi Penyintas Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat" terhitung mulai tanggal 15 April 2021 sampai dengan 21 April 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

Jakarta, 30 April 2021

Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia,



Indah Suwarni
NIP. 19670806 199301 2 001



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara dan Timeline Penelitian
PEDOMAN WAWANCARA

Colaborative Governance Penanganan *Shelter* Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Pertanyaan Wawancara

Tanggal wawancara : :

Koordinator Klaster

Pengungsian dan

Perlindungan, Direktur

PSKBA Kemensos.

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa Peran Unit Kerja anda Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
2. Bagaimana menetapkan Tujuan dalam Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
3. Pihak mana Ssaja yang terlibat Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB	
4. Apakah semua terlibat dalam kepemimpinan Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
5. Bagaimana Komunikasi antar lembaga yang terlibat Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)	
6. Apakah masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (Sumber Dana, SDM, Tenologi, Manajemen)	
7. Permasalahan apa yang ditemukan Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	

Tanggal wawancara :
 Direktur Penanganan
 Pengungsi BNPB.

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa Peran Unit Kerja anda Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
2. Bagaimana menetapkan Tujuan dalam Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
3. Pihak mana saja yang terlibat Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (Kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Daerah, NGO,INGO, Swasta)	
4. Apakah semua terlibat dalam kepemimpinan Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
5. Bagaimana Komunikasi antar lembaga yang terlibat Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)	
6. Apakah masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (Sumber Dana, SDM, Tenologi, Manajemen)	
7. Permasalahan apa yang ditemukan Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	

Tanggal wawancara : :

Kepala Dinas Sosial
Provinsi NTB.

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa Peran Unit Kerja anda Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
2. Bagaimana menetapkan Tujuan dalam Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
3. Pihak mana saja yang terlibat Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (Kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Daerah, NGO,INGO, Swasta)	
4. Apakah semua terlibat dalam kepemimpinan Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
5. Bagaimana Komunikasi antar lembaga yang terlibat Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)	
6. Apakah masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (Sumber Dana, SDM, Tenologi, Manajemen)	
7. Permasalahan apa yang ditemukan Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	

Tanggal wawancara : :

Perwakilan NGO/Lembaga

Usaha dan Lembaga

Internasional

Nama Institusi/Lembaga : :

Peran dalam Kolaborasi : :

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa Peran Unit Kerja anda Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
2. Bagaimana menetapkan Tujuan dalam Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
3. Pihak mana saja yang terlibat Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (Kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Daerah, NGO,INGO, Swasta)	
4. Apakah semua terlibat dalam kepemimpinan Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
5. Bagaimana Komunikasi antar lembaga yang terlibat Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)	
6. Apakah masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (Sumber Dana, SDM, Tenologi, Manajemen)	
7. Permasalahan apa yang ditemukan Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	

Tanggal wawancara :

Penerima manfaat

Shelter/Huntara.

Alamat.

Kab/Kota :

Kecamatan. :

Desa/Kelurahan :

Peran Dalam Kolaborasi :

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa anda terlibat dalam Penetapan tujuan Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
2. Bagaimana	
3. Apakah anda pernah terlibat dalam kepengurusan kelompok kerja Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	
4. Apakah anda pernah dimintai pendapat atau diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat kepada para pihak yang terlibat dalam kelompok kerja Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)	
5. Apakah anda menerima atau memberikan bantuan dalam pembangunan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (uang, bahan, pelatihan/penyuluhan/sosialisasi	
6. Masalah apa yang ditemukan Dalam Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	

Lampiran 2 Pedoman Telaahan Dokumen.

Colaborative Governance Penanganan *Shelter* Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Dokumen/Laporan
1.	Dasar Hukum Pelaksanaan (SK, Surat Edaran, Buku Panduan) Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB.
2.	Dokumen Perencanaan Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB.
3.	Peta sebaran Kerusakan Rumah terdampak Bencana Gempa Bumi NTB
4.	Peta Sebaran Sasaran Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB.
5.	Daftar Lemgaga yang terlibat Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB.
6.	Laoran 5 H+W Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB.
7.	Laporan Realisasi Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB.
8.	Laporan Akhir Penaganan <i>Shelter</i> Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB.

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Lampiran 3 Rencana Time Table Pelaksanaan Penelitian

No		Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pencarian judul																						
	Pengajuan judul																						
2	Penyusunan proposal																						
	Permasalahan penelitian																						
	Kerangka Teori																						
3	Metodologi penelitian																						
	Revisi Proposal																						
	Final Proposal																						
	Seminar Proposal																						
	Perbaikan Proposal																						
	Pengajuan ijin penelitian																						
	Pengumpulan data																						
	Analisa data																						
4	Searching literature																						
	Hasil Penelitian																						
	Kesimpulan dan Saran																						
	Final laporan																						
5	Pendaftaran Seminar Hasil																						
	Seminar Hasil																						
	Perbaikan Seminar hasil																						
	Pendaftaran Sidang Tesis																						
	Sidang Tesis																						
	Perbaikan Tesis																						

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Transkrip wawancara dengan Bapak H Rahmatullah

PERTANYAAN: assalamualaikum wr wb, mohon izin ini dengan bapak siapa?

JAWABAN: Bapak Haji Rahmatullah

PERTANYAAN: izin pak kami sedang melakukan evaluasi penanganan bencana gempa di lombok, sebelumnya mau nanya dulu sebentar ya, bapak tinggal dan asli sini ya?

JAWABAN: iya asli sini

PERTANYAAN: dulu ketika terjadi bencana bapak terdampak bencana?

JAWABAN: dulu ketika sholat di rokaat kedua terjadi gempa, sehingga jamaah banyak yang kena genteng

PERTANYAAN: rumah bapak hancur atau sebagian?

JAWABAN: kalau saya alamduillah rusak ringan, kebetulan yang samping-samping sini juga rusak ringan, punya saudara saya yang rusak berat sampai hancur

PERTANYAAN: ketika rumahnya hancur itu bapak tinggal dimana?

JAWABAN: tinggal di pengungsian

PERTANYAAN: berapa lama pak?

JAWABAN: berapa lama ya, lumayan lama sih, dulu kita se RT itu satu pengungsian sekitar sebulan, setelah itu kita bikin tenda masing-masing itu berapa bulan ya? Lumayan lama

PERTANYAAN: apa yang bapak rasakan selama tinggal di pengungsian?

JAWABAN: selama di pengungsian banyak suka dukanya, walaupun di pengungsian ada senengnya juga karena rame, kompak juga terutama ketika ada gempa susulan kita harus gimana, mana rumah-rumah tetangga yang hancur kita bersihkan, terus kita disini bikin tendanya

PERTANYAAN: itu tendanya dari mana pak?

JAWABAN: itu tendanya dari swadaya kita

PERTANYAAN: apakah tidak ada tenda dari pemerintah pak?

JAWABAN: tidak ada, semua hasil swadaya dan posko utamanya itu tempak kita sholat dulu

PERTANYAAN: untuk kebutuhan hari-harinya bagaimana pak

JAWABAN: kebutuhan sehari-hari di awal banyak bantuan dari luar kemudian kita juga swadaya karena disini juga ada lembaga sosial, waktu itu kita mau ke KLU untuk meyerahkan baju, makanan dan uang tapi karena kita terdampak jadinya kita buat sendiri dulu untuk pondok juga dan untuk bersama

PERTANYAAN: itu murni swadaya semua pak? Tidak ada dari dinsos

JAWABAN: ada bantuan dari luar tapi kalau dari pemerintah terbatas dan orang-orang tertentu saja, kemungkinan yang kerja disini saja. Bantuan banyak dari luar, untuk dari pemerintah saya kurang tau kana tidak ikut mengurus juga cuman kita dari lar seperti di jawa gitu banyak yang ngirim

PERTANYAAN: jadi mayoritas swadaya semua ya pak?

JAWABAN: iya swadaya yang masak ibu-ibu disini, kita buatkan dapur umum disini, tidur juga di aula ini kita kasih terpal saja atasnya sama bambu

PERTANYAAN: untuk keterlibatan dalam pembentukan pengungsianya gimana pak

JAWABAN: yang menentukan pembentukannya ya bapak tuan dimana nanti bangun tendanya

PERTANYAAN: jadi bapak selama di pengungsian perannya apa?

JAWABAN: perannya disini ndak satu jadi siap untuk ngerjakan apapun karena swadaya, nyiapin air nyiapin MCK karena gak ada dari luar jadi ngalir gitu aja

PERTANYAAN: terus di *shelter* itu ditentukan ndak pak yang ngatur logistik siapa yang ngurusin pendataan siapa

JAWABAN: kemarin ada yang ditentukan siapa yang ngurus bantuan dan pendataan

PERTANYAAN: kemarin kan dari pemda juga ada membuat *shelter*, ada keinginan bapak pindah gak? Disana kan logistik tercukupi

JAWABAN: kita disini nyaman. Karena disini semua keluarga meskipun gaada dari pemerintah tapi dari swasta mengalir terus dan kita juga terorganisir sehingga alhamdulilah bisa tercukupi. *Shelter* dari pemerintah juga dikasih terpalnya

PERTANYAAN:ini tanahnya dari siapa pak
JAWABAN:ini tanah desa
PERTANYAAN:waktu pembentukan *shelter* bapak ditunjuk sebagai apa? Imam masjid kah?
JAWABAN:saya yang mengkoordinir remaja, seperti mau bikin tenda dan mck saya yang koordinir lalu pengadaan airnya juga
PERTANYAAN:pernah gak pak yang disini diajak rapat pemda
JAWABAN:tidak pernah pak
PERTANYAAN:kalau ada kekurangan lapor ke pemda ndak pak
JAWABAN:kalau ada kekurangan kita kabar dari mulut ke mulut tapi yang menuntaskan nanti dari RTnya
PERTANYAAN:dari bapak pribadi tidak pernah diminta ngurus ini ngurus itu
JAWABAN: tidak secara pribadi
PERTANYAAN:kalau boleh tau pernah ada bantuan uang tunai?
JAWABAN:kalau dari pemerintah dan LSM saya kurang tau karena saya tidak terlibat langsung
PERTANYAAN:Untuk kekurangan penanganan kemarin apa pak?
JAWABAN:kalau dari pemerintahnya ya karna terlalu luas wilayah jadi tidak teenuh semua, kalau disebut semua kekurangannya banyak jadi mungkin pemerintah fokus ke yang lebih membutuhkan daripada kita karena kita mengalami hal yang sama, alhamdulillah kita terorganisir jadi kekurangan itu bisa terpenuhi, kalau kurang air kita usaha sendiri, kemarin dari bantuan dari PAGARI ada mesin air dan tandon karena tandon kita yang disini pecah

Transkrip wawancara dengan bapak sudi (kota mataram)

PERTANYAAN:apakah pak sudi terlibat dalam penetapan pengungsian dan tujuan mengungsi?
JAWABAN:terlibat
PERTANYAAN:tujuan dari penetapan pengungsian ini apa pak?
JAWABAN:untuk melindungi warga dari gempa karena warga tidak berani pulang
PERTANYAAN:untuk lokasi pengungsian sudah didiskusikan dengan pihak terkait?
JAWABAN:dadakan, pas terjadi gempa kita langsung cari lahan kosong bersama sama
PERTANYAAN:kalau boleh tau bapak mengungsi bersama berapa orang pak?
JAWABAN:dalam satu tenda atau semua?
PERTANYAAN:semua pak dalam satu lingkungan
JAWABAN:kemarin itu ada 65 KK di timur, di sebelah barat sekitar 140an KK
PERTANYAAN:apakah ada kepanitiaan di pengungsian untuk mengkordinator bantuan
JAWABAN:kepanitiaan tidak ada, koordinator kepala RT, kepala lingkungan, kader-kader posyandu
PERTANYAAN:jadi dari orang-orang ini dikumpulkan dan koordinasinya lewat kepala RT, Kepala lingkungan dan kader posyandu. Apakah ada rapat atau bapak pernah dimintai pendapat?
JAWABAN:pernah, tapi kalau ada bantuan nanti dibagi 3 RT dan ketua RT yang menentukan
PERTANYAAN:izin pak apakah bapak diminta pendapat atau masukan warga membutuhkan apa?
Mungkin dari NGO atau pemerintah
JAWABAN:kemarin kalau permintaan warga Cuma 1 saja terpal, kalau sembako sudah serba ada yang masuk dari pemerintah
PERTANYAAN:jadi bapak dimintai pendapat warga butuh apa?
JAWABAN:iya hasil uji di lapangan masyarakat mintanya apa itu yang kita fokuskan untuk minta ke pemerintah
PERTANYAAN:misal bapak mendata kebutuhan masyarakat atau mengevaluasi nanti laporanya ke siapa ya pak?
JAWABAN:ke lurah, camat, pak dewan, jadi yang dibutuhkan ini ini, masyarakat swadaya membeli sendiri kalau dari pemerintah kan lama jadi masyarakat beli sendiri dengan swadaya. Seminggu atau 10 hari baru dateng. Karena kemaren tidak ada yang percaya kalau disini rata,

pemerintah fokus ke tanjung jadi diperbanyak bukti foto sehingga akhirnya turun, nah setelah ada yang turun akhirnya turun semua. BPBD juga kesini

PERTANYAAN:BPBD memberikan apa saja pak?

JAWABAN:Banyak yang diberikan seperti sembako, ada bantuan tenda

PERTANYAAN:toilet juga dibantu?

JAWABAN:ada dari dinas perkim dari pak wali

PERTANYAAN:kalau dari organisasi kayak NGO dan relawan?

JAWABAN:banyak mbak tapi tidak kita rekap dan catat

PERTANYAAN:untuk trauma healing pak dan sosialisasi?

JAWABAN:ada trauma healing dan sosialisasi pengobatan juga

PERTANYAAN:kalau kesehatan dari dinas kesehatan lancar ya pak?

JAWABAN:ada dari dinas kesehatan kesini malam malam bawa narsum kesini ngecek karena disini paling terparah

PERTANYAAN:kalau pendidikan anak-anak bagaimana pak?

JAWABAN:lancar tetap berjalan dari mahasiswa kita fasilitasi tempatnya, sekolah darurat kita buatkan biar gak trauma

PERTANYAAN:kalau bantuan uang?

JAWABAN:kalau uang tidak ada, lebih ke barang-barang

PERTANYAAN:kalau boleh tau selama tggal di pengungsian timur ini berapa lama?

JAWABAN:hampir 1 tahun langsung digusur ini kemaren

PERTANYAAN:selama 1 tahun hidup dengan banyak orang di pengungsian apakah ada masalah pak?

JAWABAN:tidak ada masalah, maksudnya kita sudah fasilitaskan lah, kita tata mereka kayak tinggal di rumah sendiri sambil menunggu rumah dibangunkan karena progresnya langsung kan habis digusur langsung dibangun. Sekitar 1,5 tahun

PERTANYAAN:itu mungkin pas awal-awal agak lama di mataram itu permasalahannya

JAWABAN:iya tapi pas bantuan turun itu sudah langsung turun semua jadi tidak ada masalah, mungkin pas awal-awal saja 2-3 hari pertama karena kan bantuan fokusnya di lombok utara

PERTANYAAN:ada dapur umum pak?

JAWABAN:tidak ada karena terkait lokasi mbak kita upayakan bisa masak sendiri-sendiri

PERTANYAAN:tidak ada masalah lain misalnya kesehatan waktu di lokasi pengungsian

JAWABAN:tidak ada karena semua sudah ditangani, semua sudah di data mana lansia, balita ibu hamil sudah ada datanya

PERTANYAAN:konflik antar masyarakat tidak ada pak?

JAWABAN:tidak ada kondusif karena kita ngerasa sama-sama susah

PERTANYAAN:di beberapa tempat kan ada konflik antar masyarakat pak karena tinggal bersama banyak orang

JAWABAN:disini kita arahkan jadi masalah sembako masalah apapun sudah diarahkan

Transkrip Wawancara Ibu Rumiati – Mataram

Pertanyaan : waktu itu kan pengungsinaanya disini ya?

Jawaban : di sawah sana..

Pertanyaan : inisiatif sendiri atau gimana?

Jawaban : iya ini kita semua kan keluar kesini, kita sendiri, kan waktu itu kita takut, 1 menit lagi digoyang gempa, 5 menit lagi digoyang, kita takut akhirnya kita bareng-bareng ke lapangan

Pertanyaan : waktu itu berapa lama dipengungsian?

Jawaban : hampir setahun, belum jadi rumah kita belum pulang

Pertanyaan : dari awal itu kan memang inisiatif masyarakat sendiri kan ya...

Jawaban : iya sendiri, pake tenda terpal bocor-bocor kan karena belum dapet sumbangan, gimana ya klo tidak sendiri...

Pertanyaan : abis itu apa ada yang dateng ngasih bantuan?

Jawaban : ada

Pertanyaan : itu dari mana aja ya Bu..

Jawaban : yang lebih tau mungkin Pak Kaling (kepala lingkungan) yang ngurusin dari mananya... sumber mana yang ngasih ke kami itu kita gak tau , kita taunya dapet mie atau beras, dapet 1 Kg 2Kg kita tinggal nerima,

Pertanyaan : waktu itu, pernah dimintai pendapatnya.....butuh apa gitu

Jawaban : gak ada, jika ada bantuan apapun apa itu beras, pampers, itu di bagi semua, kami gak mau membebani, kita terima aja sudah, selama penanganan rumah ini karena gempa ya... kecuali yang punya anak kecil apa dia dapat pampers

Pertanyaan : apakah ada kepanitiaan dalam mengelola pengungsian, sehingga akelihatan peran masing-masing, seperti apa ada yang khusus di dapur...

Jawaban : gak ada, kita sendiri-sendiri aja, misalnya klo kita dapet bagian, satu keluarga dapet sendiri, yang lain sendiri... masak sendiri, kecuali kalo mau makan bareng, yang kayak kelompok itu gak ada

Pertanyaan : berapa KK ya itu bu.. berapa orang

Jawaban : kloa disini 5 rumah aja,, klo yang dilapangan bnyak, apalagi disebelah barat sana,, bnyak..

Pertanyaan : kalo tenda yang ada dari BNPB atau dinsos gitu tau gak Bu

Jawaban : yang dari bei kanal atau besi baja itu,, itu ada, bikin tenda

Pertanyaan : itu tendanya dimana Bu

Jawaban : ada dekat sini, di rumah yang rusak

Pertanyaan : waktu itu Ibu dapat bantuan apa aja

Jawaban : tiker, sembako, selimut,

Pertanyaan : kalo untuk toiletnya bagaimana Bu..apakah disiapkan?

Jawaban : kalo kita kan ini dekat dari rumah ya.. lari-lari sudah caranya kerumah kita yang rusak itu, mandi juga cepat-cepat gitu

Pertanyaan : apakah ada sosialisasi atau penyuluhan gitu

Jawaban : ada tim dari jakarta juga ada, kebetulan ada keluarga saya dari jakarta itu kan, belum tau kalo tempat saya yang kena gempa, nah dia tanya ke saya apakah kau kena gempa , gempanya dimana nya,,, nah saya jawab iya kena, gempanya yang rumah saya itu..kebetulan ada relawannya itu datan kesini, ya membagi sembako itu, ada pemipes mie..susu

Pertanyaan : ada kegiatan trauma healing itu

Jawaban : ada

Pertanyaan : anak-naka sekolah itu gimana

Jawaban : libur total, dulu kan masih kerasa gempa, tp dulu kadang kadang ada seminggu masuk, tapi gak lama-lama

Pertanyaan : selama dipengungsian ada yang kasih pendidikan gitu

Jawaban : ada

Pertanyaan : itu dari mana tuh

Jawaban : dari mana ya...saya gak tau, kadang dari bapak walikota sini, bantuan juga ada ada hadiah juga kayak buku tulis, pensi,,, itu dari bapak walikota

Pertanyaan : kalo bantuan dalam bentuk uang ?

Jawaban : klo uang gak ada

Pertanyaan : uang jaminan hidup dikasih gak?

Jawaban : udah 1 tahun baru keluar

Pertanyaan : itu berapa bulan Bu

Jawaban : ada 8 bulanan, soalnya lain-lain yang datang

Pertanyaan : maaf Bu, kemaren dipengungsian berapa lama

Jawaban : lama kita, hampir satu tahun.. kan selama penanganan rumah gempa ini yang pertama, itu pun 3 bulan , baru yanbg jadi itu rumah desa, yang ke dua itu yang sana... yang ketiga itu kita, yang rusak ringan itu

Pertanyaan : selama ada pengungsian apakah ada masalah ,

Jawaban :tidak ada sih

Pertanyaan : lancar aja ya Bu

Jawaban : gak ada masalah, jadi ada barang 100 itu di bagi dulu setengah2... yang penting rata gitu

Transkrip wawancara dengan pak herman – Karang bedil

PERTANYAAN:Keterlibatan bapak di *shelter* ini apa pak?

JAWABAN:terlibat tapi tidak secara langsung

PERTANYAAN:siapa yang mengkoordinir *shelter*?

JAWABAN:bapak Kepala dusun

PERTANYAAN:apakah bapak pernah menerima bantuan uang, bahan makanan atau sosialisasi?

JAWABAN:dulu Cuma dapat bantuan PKH, bantuan terpal, yang bantu dari orang wisata bukan dari pemerintah. Saya jadi relawan ACT di timur untuk mobilisasi air

PERTANYAAN:apakah bapak dilibatkan dalam kepengurusan *shelter*

JAWABAN:tidak terlibat, hanya pernah diminta angkat sumbangan di koramil, saya gak terlibat terlalu dalam hanya membantu

PERTANYAAN:apakah ada rapat-rapat di pengungsian?

JAWABAN:ada rapat membahas bantuan, pembagiannya secara rata

PERTANYAAN:apakah bapak diminta memberikan pendapat?

JAWABAN:saya diberikan waktu atau idak untuk berpendapt saya tetap memberikan pendapat saya nbaik diterima maupun tidak

PERTANYAAN:contohnya apa pak pendapatnya?

JAWABAN:saya pernah berpendapat menyuruh teman untuk bertanya karena dia tidak dapat bantuan sementara yang lain dapat, harusnya kan dijelaskan kenapa ada yang dapat ada yang tidak dapat karena nantinya jadi masalah diomongin dibelakang

PERTANYAAN:untuk trauma healing apakah ada relawan yang memberikannya?

JAWABAN:tidak ada relawan yang kesini kecuali melalui kadus kita, kalau secara langsung jarang, kebanyakan dari wisatawan bukan pemerintah

PERTANYAAN:selain pembagian sumbangan tidak merata apakah ada masalah lain?

JAWABAN:awal-awal kita memang kekurangan, tai karena kita kerjasama dan kompak disini jadi ya kta cari solusinya sama-sama, awal-awal kita minumnya ya air kotak atau air botol

Transkrip wawancara dengan Bapak Idris –Kota Mataram

PERTANYAAN:Apa peran bapak dalam Penanganan *Shelter* Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?

JAWABAN:saya disini sebagai penerima *shelter* yang di BTN Sweta, kalau dalam pengungsian saya sendiri terlibat dalam pendistribusian bantuan ke pengungsi di BTN Sweta

PERTANYAAN:Bagaimana menetapkan Tujuan dalam Dalam Penanganan *Shelter* Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?

JAWABAN:tujuan dari penanganan *shelter* selain untuk melindungi diri juga saling berbagi dengan penyintas yang lain. Jadi disini selain kita mencari tempat berlindung yang aman juga kita saling berbagi dengan orang-orang lain di pengungsian.

PERTANYAAN:Apakah bapak terlibat dalam kepengurusan *Shelter* disini?

JAWABAN:Terlibat terutama dalam pendistribusian makanan, terpal, sembako, pakaian ke daerah yang terdampak lebih parah

PERTANYAAN:Apakah Bapak pernah dimintai pendapat atau diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat?

JAWABAN:Pernah terutama tentang pelaksanaan pembagian bantuan ke daerah yang lebih parah

PERTANYAAN:Apakah Bapak pernah menerima atau memberikan bantuan dalam pembangunan *Shelter* Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?

JAWABAN:*Shelter* di BTN Sweta merupakan swadaya masyarakat sekitar untuk bantuan ada dan kita kumpulkan kembali untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di tempat yang lebih parah

PERTANYAAN:Apakah ada masalah selama di pengungsian ini pak?

JAWABAN:Tidak ada

Transkrip Wawancara dengan Ibu Marjanah – Lendang Bajur

PERTANYAAN:Apakah ibu diajak berperan dalam *shelter* disini?

JAWABAN:iya mbak saya ikut berperan di pusat Dapur Umum *Shelter* Lendang Bajur untuk menyediakan permakanan bagi pengungsi disini, say di dapur umum *shelter* lendang bajur sebagai koordinator dapur umum.

PERTANYAAN:Apakah ibu terlibat dalam Penetapan tujuan Penanganan *Shelter*?

JAWABAN:iya terlibat, semua pengungsi diajak untuk berdiskusi dalam menetapkan *shelter* dengan lokasi *shelter* yang luas dan aman agar kita bisa berindung dari bencana susulan juga dapat saling menguatkan di pengungsian

PERTANYAAN:Apakah ada kepengurusan di *Shelter* ini dan apakah ibu terlibat dalam kepengurusannya?

JAWABAN:Ya ada kepengurusan di *shelter* lendang Bajur dan saya pernah terlibat dalam pusat dapur umum *shelter*

PERTANYAAN:Apakah ibu pernah dimintai pendapat dalam penanganan *shelter*?

JAWABAN:pernah terutama dalam penanganan dapur umum, penyiapan bahan logistik di dapur umum sampai distribusi ke seluruh pengungsi disini

PERTANYAAN:Apakah Ibu menerima bantuan berupa uang atau barang?

JAWABAN:Ya, saya mendapat bantuan uang dari keluarga di luar kota, bantuan bahan makanan dari pemerintah dan NGO, dan dukungan psikososial berupa relawan datang dengan program trauma healing

PERTANYAAN:selama berada di *Shelter* masalah apa yang ibu rasakan?

JAWABAN:Ketersediaan air di *shelter* yang belum terpenuhi, pengaturan pembagian bantuan kepada penyintas yang dirasa kurang adil mbak karena terkadang ada yang menerima bantuan dan ada yang tidak menerima bantuan tapi tidak dijelaskan kenapa bantuannya tidak dibagi rata, itu kan bisa menyebabkan salah paham, kurangnya ketersediaan toilet karena hanya ada 1 jadi harus antri dan bergantian, kualitas *shelter* juga menurun saat musim hujan sering bocor dan membuat tergenang.

Transkrip wawancara dengan Ibu Solatiyah

PERTANYAAN:Minta waktunya sebentar, nah ini kita maksudnya ada wawancara ini nanti gunanya kedepannya nanti kita mau menguatkan penanganan darurat, kan Ketika waktu itu Ketika gempa bumi berlangsung tiba-tiba ya bu semuanya prosesnya cepat. Di Indonesia inikan bencana itu banyakkan jadi kita mau belajar dari yang sudah terjadi jadi supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi, jadi di sini mau tanya-tanya tentang pengalaman ibu tahun 2018. Waktu itu mengungsinya di mana ya bu?

JAWABAN:Mengungsinya di sini, di lapangan, dekat. Malam itu kita lagi duduk-duduk di dalam, melipat baju, beres-beres, waktu itu jam berapa ya ada mungkin baru isya, baru solat isya, ibu saya lagi solat isya dia, saya di sini dengan anak saya, yang satunya anak saya main di luar. Terus pas gempa datang “gempa” terus kita langsung lari, larinya pokoknya saya bawa diri lari, ya anak saya gak saya bawa, anak saya yang kecil itu di bawa oleh adek saya kalua saya sendiri saya kelapangan gak pakai sendal apa lari, terasa sekali kaki saya begoyang itu tanah lapang terus anak saya kemana terus langsung mati lampu. Kita ke lapangan terus mati lampu, kita cari saling cari semua saudara kita saling cari disana sudah kita diatap langit malam itu.

PERTANYAAN:Tidurnya

JAWABAN:Tidurnya beratap langit berasas tanah, gak ada rumput. Sudah agak mendingin baru kita ambil terpal. Baru kita alas terpal

PERTANYAAN:Takutnya ada gempa susulan ya begitu ya bu?

JAWABAN:Iya terus menerus susulannya, gak berhenti-henti sampai subuh

PERTANYAAN:Sampai subuh gempa terus? Terus rumahnya rusak atau gimana bu?

JAWABAN:Rumah saya itu masih retak-retak, di dalampun retak-retak, kalua rusak berat taklah dia cuma bata platform jatuh dan bata itu jatuh satu yang pinggir-pinggirnya itu retak-retak sampai

sekarang masih belum bisa saya perbaiki karena kemaren itu gak dapat gak keluarlah untuk saya. Terus ya gak bisalah kita perbaiki nyicil-nyicil sedikit-sedikit

PERTANYAAN:Jadi ini tempat pengungsian ini dibikin oleh masyarakat ya?

JAWABAN:Ya pertama-tama kita bersama, ini di aula ini kita pakai tenda terpal yang besar. Terus tendanya itu rusak-rusak terus kita papai kita perbaiki tendanya bocor-bocor terus kita tambal. Terus Ketika hujan kita kabur kesini kita kabur kedalam sama teman-teman. Terus baru-baru ini sudah berapa kali diperbaiki tendanya, terus masing-masing buat sendiri per keluarga sampai penuh.

PERTANYAAN:Dari inisiatif masyarakat sendiri ya?

JAWABAN:Iya.

PERTANYAAN:Dari pemerintah belum ada ya?

JAWABAN: Dari pemerintah belum ada hanya sekedarnya aja. Hanya terpal terpal saja. Seingat saya inisitif sendiri, bambu-bambu inisitaif sendiri.

PERTANYAAN:Jadi ibu terlibat dalam pengungsian itu?

JAWABAN:Iya terlibat. Kita di dapur umum.

PERTANYAAN:Terus dalam kepengurusan kelompok pengungsian itu ibu terlibat tidak bu?

JAWABAN:Terlibat. Tapi lebih kepada bapak-bapak. Kalau saya tidak ikut membuat tenda pribadi, saya ditenda besar di aula itu 15 orang disana. Kalau yang lainnya sendiri-sendiri.

Disinikan banyak tukang

PERTANYAAN:Itu ada organisasi yang masuk memberikan bantuan tidak bu?

JAWABAN:Pernah dari palang merah merah mungkin. Bapak-bapak tantara bantu kita masang air bantu kita untuk air besih, dan dating paket-paketan baju-baju bantuan, sembako dari bantuan pemerintah yang tasnya merah. Kadang dari teman-temannya kakak dari luar kota sering membantu

PERTANYAAN:Ibu pernah ditanya gak pendapatnya ibu butuh apa gitu?

JAWABAN:Gak pernah ada datang kayak gitu. Cuma yang datang untuk obat-obatan, kita diperiksa kita dikasi obat untuk masalah sembako kita gak pernah ditanya. Kalau ada baru kita dibagikan

PERTANYAAN:Kalau dari Kesehatan pernah diminta pendapatnya butuh apa? Obat apa gitu?

JAWABAN:Obat gitu. Atau kalau kita ngidap asam uurat atau derah rendah itu dikasi kita obat dikasi kita vitamin

PERTANYAAN:Ibu terima bantuan dalam pengungsian waktu itu apa berupa uang berupa bahan makanan

JAWABAN:Sembako, perlengkapan mandi, terus perlengkapan baju, handuk yang kadang-kadang bekas

PERTANYAAN:Kira-kira masalah dipengungsian apay a bu?

JAWABAN:Kalau di dapaur masalah besar, masalah laukpauknya, kalau masalah tenda itu tenda bocor gak layak kita tiduri pas hujan

Transkrip Wawancara Ibu Ida-Desa Tanjung, Lombok Utara

Pertanyaan:Ibu Ida ya tadi Namanya. alamatnya dimana ya, Bu?

Jawaban:ini jalan raya Kera Raden, Desa Tanjung, Lombok Utara

Pertanyaan:waktu itu mengungsi di daerah mana Bu?

Jawaban:Ke Batu Ampar satu minggu, turun lagi kesini kesini, sudah 2 tahun, rumah belum jadi juga

Pertanyaan:Waktu itu kan juga menerima bantuan, waktu itu apakah dimintai pendapat?

Jawaban:Kayanya gak ada ya

Pertanyaan:Waktu di pengungsian ini, apakah Ibu juga dilibatkan?

Jawaban:Kasih om om yang buat pengungsian ini makan, tapia da yang mau ada yang tidak

Pertanyaan:Siapa yang mengarahkan untuk mengungsi disini?

Jawaban:Itu ada Babinsa, namun tergantung sama pak Kadus juga

Pertanyaan:Apakah ada kelompok kerja dalam mengatur pengungsian?

Jawaban:Tidak ada sama sekali

Pertanyaan:Ibu-Ibu tidak pernah terlibat ya apakah dapur umum?

Jawaban:Pernah ada itu ACT, tapi sepertinya ada masalah, gak jadi tapi. Dapur sendiri-sendiri, meskipun ada bantuan, tapi dapur sendiri.

Pertanyaan:Apakah pernah ditanyain pendapat tentang apa yang Ibu butuhkan?

Jawaban:Tidak, tidak ada

Pertanyaan:Waktu itu apakah ada bantuan tentang kebutuhan, pendidikan, dan trauma helaing anak-anak, untuk orang tua?

Jawaban:Menerima bantuan berupa bantuan logistik kebutuhan dasar penyintas (sembako), pelayanan kesehatan dan obat-obatan, penyuluhan dukungan psikososial/trauma healing

Pertanyaan:Apakah ada sosialisasi tentang penyelamatan saat gempa?

Jawaban:Kalau untuk orang tua tidak ada tapi mungkin anak-anak ada

Pertanyaan:Jaminan hidup apakah dapat?

Jawaban:Tidak dapat, sampai saat ini tidak dapat.

Pertanyaan:Waktu itu apakah ada masalah saat mengungsi?

Jawaban:Anak-anak tidak sekolah, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, lima bulan tidak sekolah.

Pertanyaan:Kalau masalah toilet, air atau yang lain?

Jawaban:Kalau itu ada toilet darurat itu, itu air susah

Pertanyaan:Apakah anak bayi atau ibu hamil ditanganin khusus?

Jawaban:Tidak ada

Transkrip wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tanjung (Kab. Lombok Utara)

PERTANYAAN:Apa bapak terlibat dalam Penetapan tujuan Penanganan *Shelter* Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?

JAWABAN:Jelas terlibat, saya terlibat dari pemilihan lokasi dan data penerima bantuan.

PERTANYAAN: Bagaimana pemilihan Lokasi pengungsian?

JAWABAN:Tempat-tempat pengungsian hampir merata di kampung-kampung itu, dibuat hunian sementara dari terpal dan setelah itu baru datang bantuan dari BNPB sampai hari ini masih ada warga kurang lebih 8 KK yang tinggal di hunta yang dibangun oleh TNI,

PERTANYAAN: Bapak apakah pengungsi yang berada di pengungsian komunal/besar atau yang dibangun sendiri?

JAWABAN:Saya di tempat pengungsian besar yang dibangun BNPB, Dusun karang langu, desa tanjung, kec. Tanjung. Sebelumnya masyarakat sudah membangun tempat pengungsian secara swadaya seperti tenda-tenda terpal, setelah H+2 baru berdatangan bantuan dari Pemerintah dan NGO, pada saat bantuan datang yang dihubungi pertama adalah Kepala-kepala desa dipanggil rapat, dan berkumpul dengan kepala-kepala dusun bagaimana mendistribusikan bantuan, dan ada radio komunitas untuk menyampaikan informasi kepada warga.

Dimasing-masing dusun dikoordinatori oleh kepala dusun bagaimana distribusi bantuan, kemudian bagaimana hubungan warga dengan koordinator di titik pengungsian dengan memberdayakan karang taruna dan tokoh masyarakat.yang bertugas untuk pencatatan bantuan,

PERTANYAAN:Permasalahan yang terjadi pelaporannya bagaimana?

JAWABAN: Koordinasinya dari kepala dusun ke kepala desa dan kepala desa menyampaikan ke atasan yakni BPBD dan posko terpadu BNPB, yang namanya posko pengungsian pasti banyak masalah dan kepala desa berkeliling untuk melakukan edukasi dengan memberikan pemahaman tentang posko pengungsian.

PERTANYAAN:Bantuan berupa apa? Selain sembako?

JAWABAN: Banyak sekali relawan, NGO dan donatur yang datang yang memberikan selain sembako juga ada Pendidikan trauma healing, hanya beberapa tempat yang mendapatkan sanitasi air bersih.

PERTANYAAN:Bagaimana ntuk Pendidikan atau sekolah?

JAWABAN: Untuk Pendidikan semuanya vakum tapia da beberapa relawan yang memberikan sekolah-sekolah di pengungsian

PERTANYAAN:Apakah ada posko khusus kelompok rentan?

JAWABAN: Ada posko khusus untuk yang khusus mempunyai bayi dari ROTARI, dan dia menginformasikan dulu kepada kepala untuk data siapa saja yang mempunyai bayi.

PERTANYAAN: Apakah ada posko khusus untuk disabilitas?

JAWABAN: Tidak ada posko khusus untuk lansia dan disabilitas, kebanyakan bantuan pokok sehari-hari

PERTANYAAN: Permasalahan apa yang terjadi di *shelter*?

JAWABAN: Permasalahan di *shelter* hanya seperti konflik tentang penerimaan bantuan, tetapi bisa di selesaikan dengan cepat oleh kepala desa.

PERTANYAAN: Penyakit yang sering dialami masyarakat?

JAWABAN: Penyakit yang paling banyak diare dan demam.

PERTANYAAN: Pelayanan kesahatan?

JAWABAN: Ada datang 1 minggu sekali petugas Kesehatan.

PERTANYAAN: Pelaporan evaluasi setelah ada pemantauan pengungsian?

JAWABAN: Kami sampaikan kepada posko terpadu BPBD dan BNPB

PERTANYAAN: Apakah ada permasalahan kekurangan logistic di dapur umum?

JAWABAN: Tidak ada permasalahan di dapur umum, karena yang hanya ada dapur umum di daerah ini hanya 1 yang dibuat oleh Muhammadiyah (MDMC) selebihnya masak secara mandiri

Transkrip Wawancara dengan BPBD Prov NTB

JAWABAN: RTG ini saya tidak mengikuti full dan berakhir tahap 2 di tanggal 30 April 2021

PERTANYAAN: diperpanjang 2 kali ya pak?

JAWABAN: untuk tanggap darurat diperpanjang 2x kalau transisi diperpanjang sampai 30 april setelah 30 april saya kurang tau bagaimana pelaksanaannya mungkin dari PMK ada gambaran, kalau dari BNPB kan masih fokus nangani di NTT yang di Jakarta tinggal pak sestama justru saya membacanya di media online bahwa wabup KLU belum mau membuka rekening pokmas yang diblokir sebanyak 117 M yang diblokir di tahap 1 karena masih ada data anomali

PERTANYAAN: bagaimana penanganan *shelter* bagi penyintas bencana? Setelah terjadi gempa bumi para penyintas di tumpang di 1 tempat karena tidak ada hunta bagaimana peran bpbd di penyediaan *shelter*

JAWABAN: waktu itu tidak ada hunta, hunta dari swasta, sementara kami menyediakan tenda dan dapur umum bagi penyintas, pemerintah pusat juga sangat terlibat sampai waktu bulan puasa juga disediakan. Posisi di tanggap darurat peran pemerintah pusat dan daerah sudah sangat optimal. BPBD lebih banyak menyalurkan bantuan dari pusat

PERTANYAAN: bagaimana peran dari provinsi?

JAWABAN: sama dari provinsi juga menyiapkan tenda, logistik juga tapi kita lebih banyak menyalurkan dari BNPB karena kita adalah kepanjangan tangan BNPB

PERTANYAAN: bagaimana menentukan tujuan dalam penanganan *shelter* bagi penyintas, yang pertanyaan kedua pak

JAWABAN: ini kan masa menunggu ke hunta mereka, sampai hari ini belum selesai.

PERTANYAAN: masyarakat yang penerima itu sekarang dimana pak?

JAWABAN: sudah tidak ada karena rusak beratnya masih banyak di KLU tapi kekeluarganya kan tinggi jadi diungsikan di rumah saudara seperti kasus banjir di Bima, jadi ada beberapa di tenda tapi banyak yang di keluarga

PERTANYAAN: masyarakat apakah menerima DTH?

JAWABAN: kalu tidak salah hanya jadup dari kementerian sosial

PERTANYAAN: pihak mana saja yang terlibat dalam penanganan *shelter*

JAWABAN: kalau NGO saya tidak hafal namanya mungkin mbak-mbak dan bapak lebih memahami, tapi K/L pemda dan NGO semua berperan, kita ketahui ini bukan bencana nasional tapi bantuan nasional luar biasa meskipun bencana provinsi

PERTANYAAN: untuk NGO internasional apakah adakah yang masuk?

JAWABAN: tidak bisa masuk karena masih bencana tingkat provinsi

PERTANYAAN: Kalau NGO Nasional pak?

JAWABAN: saya kira banyak, semacam profesi-profesi di perusahaan tambang dengan CSRnya, NGO yang bersifat asosiasi juga banyak mungkin datanya juga ada coba saya tanyakan wayan biar lebih lengkap nanti kapan mas surya pulang bisa saya lengkapi karena saya hanya paham di kulitnya saja tidak sampai teknis karena pertanyaannya lumayan teknis

PERTANYAAN:boleh pak kementerian apa berbuat apa mungkin nanti disampaikan, di NTB ini unik karena RTG ini dibangun dengan DSP di tanggap darurat tidak seperti bencana lain yang harus nunggu dana hibah RR di pasca bencana

JAWABAN:saya tidak tau hukum tapi kalau di daerah DSP ini berupa BTT dan DSP ini merupakan langkah berani pemerintah karena belum pernah menggunakan DSP untuk pembangunan RTG rehab-rekon, jadi jangan anggap penanganan NTB ini hal yang luar biasa, ini hal yang biasa karena sejak zaman belanda sudah ada namanya swakelola. Cuma sisi sumber dana ini merupakan hal yang luar biasa karena menggunakan DSP untuk proses rehab rekon. Secara teknis justru saya bisa katakan penanganan ini radak melenceng karena di swakelola tidak ada uang yang bisa dibawa lari oleh orang subkontraktor. Swakelola bisa dikerjakan oleh pokmas, BUMN tidak mengerjakan langsung hanya memproduksi bahan panel RISHA. BUMN hana suplier bukan subkontraktor.

PERTANYAAN:apakah semua terlibat dalam kepemimpinan *shelter*?

JAWABAN: besok saya kirim datanya ya, saya pernah dengar tapi saya lupa sehingga saya kirim saja datanya daripada saya mencula mencele

Transkrip wawancara dengan bapak chandra-Dinsos Prov NTB

PERTANYAAN:bagaimana peran dinsos prov NTB dalam penanganan *shelter* bagi penyintas gempa bumi NTB?

JAWABAN:terimakasih untuk kawan-kawan pmk yang berkunjung ke NTB untuk melakukan evaluasi penanganan *shelter* bagi penyintas gempa bumi di NTB tahun 2018 atas nama dinas sosial saya mengucapkan terimakasih dan selamat datang. Peran dinas sosial dalam penanganan *shelter* bagi penyintas gempa bumi di NTB tahun 2018 adalah kami menyediakan berdirinya *shelter* serta berkoordinasi dengan NGO-Ngo yang memiliki tugas dalam penanganan *shelter*, tentu setelah *shelter* berdiri akan banyak komponen-komponen pendukungnya harus adanya dapur umum kami menyediakan dapur umum, kami juga berkoordinasi dengan PUPR dan dinkes untuk mendirikan toilet dan mck. Setelah *shelter* berdiri banyak unsur-unsur pendukung seperti dapur umum, toilet, mck, tentu pendistribusian logistik bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi seperti selimut, matras tempat tidur di pengungsian komunal. Jadi itu dia yang kita lakukan mbak untuk pemenuhan *shelter* kita berkoordinasi dengan NGO yang membangun *shelter*, penyediaan dapur umum, pendistribusian logistik permakanan dan non makanan. Jadi kita mengkoordinir melaksanakan juga serta melengkapi dengan unsur-unsur pendukungnya

PERTANYAAN:waktu itu berapa lama ya pak inggal di *shelter*

JAWABAN:beragam ya mbak mulai yang nggak parah 1 minggu, yang agak sedang-sedang ada yang sampai 3 bulanan bahkan 6 bulanan samai 1 tahun sampai rumahnya jadi, RTG dibangun serentak itu juga tukang terbatas, material terbatas jadi lama pengerjaannya. Tapi pelayanan dasar tetap diprioritaskan

PERTANYAAN:jadi untuk rumah rusak berat mereka sekarang tinggal dimana?

JAWABAN:mereka ada yang kembali ke rumahnya dengan membangun rumah dengan material seadanya, ada yang tinggal di dekat rumahnya.

PERTANYAAN:kalau untuk menentukan lokasi *shelter*nya bagaimana pak?

JAWABAN:kalau untuk penentuan lokasi itu kewenangan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan karena butuh lahan luas yang biasanya lahannya dipinjamkan

PERTANYAAN:biasanya siapa yang menentukan?

JAWABAN:cukup sampai level camat dan didiskusikan dengan dinas sosial kabupaten

PERTANYAAN:bagaimana menetapkan tujuann *shelter* bagi para korban

JAWABAN:koordinasinya di dinas sosial dan kepala daerah, juga BPBD karena bpbd tidak bisa lepas dai dinas sosial karena harus melindungi korban, biar di pengungsian tidak kayak gelandangan. Kita juga koordinasi dengan korban dan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi yang layak dan bebas dari bencana baik banir, pohon tumbang kalaupun ada gempa juga aman

PERTANYAAN:pihak mana saja yang terlibat dalam penanganan *shelter* gempa NTB

JAWABAN:semuanya terlibat seperti Kemensos, BNPP tenda-tendanya ada di sini, ada juga PMI. Kemendikbud memiliki tenda sekolah darurat tapi mereka harus memperbanyak tenda karena sempat minta ke dinsos tapi kami tidak bisa karena tenda kami untuk pengungsian bukan untuk

belajar mengajar. Kalau dari pemprov ada BPBD, PMI provinsi. Kalau swasta ada dari pertamina sama PLN. Mereka suport LPG untuk masak. Telkomsel memberikan pulas gratis dan peningkatan bandwitch. BRI juga membangun *shelter* komunal. NGO banyak ya ada RC, wahana Visi, Adra banyak lagi ada datanya, komunitas dari komunitas motor ada juga perguruan tinggi yang terlibat dari organisasi mahasiswa

PERTANYAAN: untuk pelayanan kesehatan di *shelter*?

JAWABAN: ada di setiap pengungsian dari Dinkes dan Puskris

PERTANYAAN: apakah semua terlibat dalam kepemimpinan penanganan *shelter*?

JAWABAN: kita kolektif mbak, tiap pagi kita rapatkan. Kemarin evaluasinya apa dan hari ini mau ngapain. Ada 2 rapat di pospenas untuk pemerintah dan ada rapat perwakilan NGO. Harusnya bisa duduk bersama kedua pihak ini tapi pernah rapat bersama tidak bisa semua ngomong mbak jadi akhirnya kita pisahkan dan NGO kita yang mewakili

PERTANYAAN: jadi semua terlibat ya pak?

JAWABAN: ya mbak semua terlibat karena kalau tidak terlibat malu kita nanti ditelpon-telpon pak sekda

PERTANYAAN: untuk komunikasi bagaimana pak?

JAWABAN: komunikasi maksudnya bagaimana pak? Lewat alat atau sosial?

PERTANYAAN: komunikasi lewat rapat saja atau setelahnya ada komunikasi khusus?

JAWABAN: kita berkomunikasi lewat WA grup *shelter* bahkan sampai sekarang masih ada WA grupnya

PERTANYAAN: pada waktu perencanaan dan evaluasi berarti semua duduk bersama ya pak?

JAWABAN: untuk perencanaan dan evaluasi kita duduk bersama kalau ada kasus kasuistik kita diskusi lewat WA grup

PERTANYAAN: untuk pelaporannya bagaimana pak?

JAWABAN: jadi setiap hari kita isi di matriks lewat WA yang dilaporkan untuk ke rapat

PERTANYAAN: kontribusi masing-masing pihak dimana pak?

JAWABAN: memang ada berbagai macam kontribusi, BNPB dengan DSPnya, Kemensos dengan Logistik 1 pesawat karena tidak ada dananya, unsur pemerintah lain ada dengan dana. SDM ini dari TNI, POLRI, BASARNAS, TAGANA. Kominfo dengan teknologinya, wfp selain logistik juga di teknologi dan bantuan teknis pengelolaan logistik, IOM dengan manajemen pengungsian, IFRC manajemen fisik *shelter*,

PERTANYAAN: Permasalahan apa saja yang dihadapi?

JAWABAN: ketersediaan lahan untuk *shelter* kolektif itu susah mbak, ada yang lahan luas tapi tidak aman bencana, ada yang aman bencana tapi aksesnya susah. Lalu kualitas bahan *shelter* yang kurang tahan lama juga mbak sehingga harus diganti 2-3 kali, ketersediaan toilet dan mck juga harus diperhatikan lagi, manajemen pembuangan sampah dan limbah.

Transkrip Wawancara – Direktur Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pertanyaan: Apa peran unit kerja Anda dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?

Jawaban: Menyiapkan hunian sementara dan kebutuhan dasar bagi Pengungsi

Pertanyaan: Bagaimana menetapkan tujuan dalam penanganan *shelter* bagi penyintas gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?

Jawaban: Dengan rapat koordinasi antara pusat dan daerah

Pertanyaan: Pihak mana saja yang terlibat dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018 (Kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Daerah, LSM nasional, LSM internasional, swasta)?

Jawaban: Kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, LSM nasional dan internasional

Apakah semua terlibat dalam kepemimpinan penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?

Jawaban: Terlibat semuanya

Pertanyaan: Bagaimana komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018 (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)?

Jawaban: Diadakan rapat persiapan dan evaluasi

Pertanyaan: Apakah masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempabumi di Provinsi NTB tahun 2018 (sumber dana, SDM, teknologi, manajemen)?

Jawaban: Tenaga ahli manajemen *shelter*, bantuan non tunai, pelibatan masyarakat, dan bantuan teknis lainnya

Pertanyaan: Permasalahan apa yang ditemukan dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB?

Jawaban: Masih banyak data ganda bagi penerima bantuan perbaikan rumah

Transkrip Wawancara - Koordinator Klaster Perlindungan dan Pengungsian, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos

Pertanyaan: Apa peran unit kerja Anda dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?

Jawaban: Melakukan penanganan segera layanan *shelter* darurat, Mengidentifikasi kebutuhan *shelter*, Menetapkan tujuan bersama multi sektir penanganan shelter di NTB, Aktivasi Sub Klasnas *Shelter*, Identifikasi kemampuan 5W sub klaster shelter, Menyepakati SOP bersama sub klaster *shelter*, Melakukan intervensi *shelter* bersama multi sektor, Monitoring dan evaluasi kegiatan shelter di NTB, Mengkoordinasikan tindak lanjut bersama Kemnko PMK

Pertanyaan: Bagaimana menetapkan tujuan dalam penanganan *shelter* bagi penyintas gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?

Jawaban: Tujuan dikaji berdasarkan permasalahan yang ada. Khusus di NTB, kebijakan Nasional tidak ada Huntara langsung Huntap. Namun demikian sub klaster *shelter* atas persetujuan Kemenko PMK tentap memberikan layanan Huntara melalui surat edaran Dinas Sosial Provinsi NTB. Hal ini membuktikan penetapan tujuan berdasarkan kebutuhan riel di lapangan, selain memperhatikan kebijakan Nasional

Pertanyaan: Pihak mana saja yang terlibat dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018 (Kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Daerah, LSM nasional, LSM internasional, swasta)?

Jawaban: Keterlibatan pihak dalam sub klaster shelter di NTB : PMI, Dompet Duafa, Baznas, MDMC, IFRC, IOM, BNI, Bank Mandiri, BRI, Kemenko PMK, Kemensos, KPPPA, dll (tidak kurang dari 82 lembaga) khusus bergerak di *shelter*

Apakah semua terlibat dalam kepemimpinan penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?

Jawaban: Iya, Kementerian Sosial selaku koordinator Sub Klaster *Shelter* mengkoordinir sejak awal samai dengan sesai pascaya bencana didampingi oleh Kemko PMK

Pertanyaan: Bagaimana komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018 (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)?

Jawaban: Komunikasi dilakukan secara berkala, 2 kali dalam satu minggu dilakukan di lokasi bencana untuk membahas hal-hal teknis termasuk perkembangan dan gap penanganan, silih berganti menjadi tuan rumah. Namun yang menjadi pokok di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, dengan arahan Kemenko PMK dan Komunikasi tingkat Nasional juga dilakukan secara berkala 1 minggu sekali di koordinir oleh Kementerian Sosial untuk mengetahui gap di lapangan serta dukungan yang dapat diberikan, dengan arahan Kemenko PMK

Pertanyaan: Apakah masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempabumi di Provinsi NTB tahun 2018 (sumber dana, SDM, teknologi, manajemen)?

Jawaban: Fungsi dari klaster adalah salah satunya untuk penggerahan sumber daya untuk pelayanan penyintas bencana. Karenanya di NTB penggerahan sumber daya sangat banyak, bahkan samai

dengan saat ini masih terus dilakukan penggerahan sumber daya terutama untuk pembangunan Huntap. Adapun bentuk pengrehan sumber daya berupa:

Pertanyaan: Permasalahan apa yang ditemukan dalam penanganan *shelter* bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB?

Jawaban: Kebijakan nasional tidak memberlakukan huntara menjadi kendala karena masyarakat sangat membutuhkan Huntara, sehingga kami berinisiatif untuk mengekuarkan surat rdaean dari dinas sosial provinsi NTB tentang bolehnya para multi pihak sub klaster shleter melakukan program Huntara. Belum semuanya frame tentang *shelter* sebagai suatu proses bukan produk masih terbatas sehingga penghargaan terhadap *shelter* partisipatif dan lebih manusiawi menjadi kendala. Pasar waktu itu melakukan kenaikan harga sehingga menyulitkan pengadaan bahan. Penggunaan asbesos menjadi kendala tersendiri karena berbahaya bagi kesehatan, sehingga kami mengeluarkan surat dari Dunas Sosial Provinsi untuk tidak menggunakan bahan asbesos dalam Huntara maupun Huntap



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Transkrip FGD

Pak Dave: Ya jadi itu yang saya melihat sekarang tadi itu memang sebenarnya itu masalah global, kita belum ada banyak kursus-kursus *shelter* di duniahanya ada beberapa yang punya kursus-kursus di dunia mungkin di bawah 6 total di dunia yang punya kursus *shelter* itu sangat beda kalo kita lihat CARL protection atau kita lihat water and sanitation atau kita lihat disaster manajemen atau banyak aspek yang lain ada banyak kursus untuk public helath, jadi komunitasnya yang punya pengalaman dengan cukup banyak macam-macam gaya bencana supaya mereka bisa lihat berebedaan kebutuhannya solusi opsi-opsi yang benar-benar bisa dipilih itu komunitasnya kecil dan ini menjadi tantangan besar sekali untuk indonesiadunia itu lebih besar karena kalau bicara bencana banyak yang baru masuk uga, kalau kita lihat di Palu dan Lombok ingat hari pertama saya tiba di Palu, bandaranya penuh total dengan LSM-LSM Indonesia semuanya pakai baju dengan benar dengan tulisan-tulisannya gak ada satu yang pakai tulisan dengan nama organisasi yang saya kenal dari 20 bencana di Indonesia sebelumnya semuanya organisasi baru hari itu saya buat foto-fotonya hamper tidak ada seseorang dari organisasi yang punya banyak pengalaman dengan *shelter* di Indonesia dan yang punya itu memang orang yang sudah kerja di aceh dan jadi kemampuan untuk analisis tentang kebutuhannya memang sangat sulit kalau sebagai contoh kalau kita lihat di aceh kalau setengah tenaga local sudah meninggal tidak ada tenaga local lingkungan hidupnya sudah hancur tidak ada pohon semuanya hancur ya memang kita harus ada solusi yang dating dari luar bahan yang dating dari luar tenaga yang dating dari luar memang dalam situasi yang separah itu tapi kalau kita lihat Palu hanya sedikit orang yang meninggal jadi tenaga lokalnya tetap adabanyak materi-materi bangunan lokalada banyak sama di NTB, jadi solusi yang cocok untuk aceh pasti tidak cocok untuk Palu, tapi melihat dan melakukan analisis tentang hal seperti ini dan juga budaya daerah dan macam-macam faktornya itu adalah kekurangan dan juga orang dating baru buat perusahaan cepat sekali dan setelah itu sering yang terjadi adalah masalah yang menjadi masalah sosial untuk jangka waktu yang cukup panjang seperti barak untuk di NTB biasanya kita hanya akan pakai barak kalau memang kehancuran semuanya atau karena konflik orang tidak boleh tinggal di daerah yang mereka boleh tinggal hanya kecil mereka pengungsi ke negara yang lain maka biasanya dikasih di daerah kecil yang mereka bisa tinggal dari solusinya mereka ini yang saya melihat sebagai kesulitannya kesatu, yang kedua adalah di dunia *shelter* punya masalah besar kalau saya bicara tentang sanitasi atau listrik atau air, selalu ada kementerian khusus air atau badan pemerintah khusus selalu ada khusus sanitasi selalu ada khusus kesehatan khusus pendidikan tapi gak ada satu khusus *shelter* karena *shelter* sebagian dari planning dari beberapa kementerian yang ikut, jadi tidak ada satu belum ada kursi yang jelas belum ada posisi duduk yang jelas bersama pemerintah. Kalau saya lihat hunian adalah sekitar 20% ekonomi negara bangunan hunian bangunan kota bangunan desa itu sekitar 20% dari ekonomi, jadi hanya actor dari pemerintah dan private sector jadi ini menjadi kesulitan yang cukup besar kalau kita lihat bagaimana proses keputusan tentang *shelter* dan kita sudah banyak diskusi dengan harapan untuk mungkin kalau ada pedoman kalau ada standar kalau ada macam-macam kaya akan membantu tapi mungkin ini yang saya melihat setelah itu sebagian dari gambar tapi saya merasa itu menjadi sebagian yang cukup penting untuk saya. Dan itu yang menjadi menarik sebenarnya Pak Nelwan, sambil kita lihat bencana kemarin kalau kita ngobrol bersama PUPR mereka melihat masalah *shelter* sebagai masalah fisik tentang objek yang harus dibangun, kalau kita melihat kita bicara bersama bapenas mereka lihat sebagai masalah tempat yang harus dipilih kalau kita bicara dengan kementerian sosial mereka melihat itu sebagai masalah sosial tapi sebenarnya yang jadi masalah dengan semuanya dan bagian-bagian lainnya yang hanya melihat, BMKG melihat sebagai masalah risiko, tapi kalau saya bicara bersama Pak Nelwan dari PMK itu berbeda kerena semua kementerian ini jatuh di bawah PMK jadi selalu ada diskusi bersama Bapak dapat langsung melihat masalah sosial dampaknya beberapa aspek, tapi biasanya itu menjadi sulit karena proses turun uang dari pemerintah harus diarahkan ke satu kementerian dan ini menjadi yang kesulitan besar untuk *shelter*, jadi kalau yang saya melihat paling sulit di Palu adalah diskusi diantara semua pihak pemerintah tentang kebutuhan masyarakat disana dan keputusan bersama itu menjadi kesulitan yang sangat besar, itu saja cukup dari saya

Pak Nelwan: Terima kasih Dave Wahyu, ada 2 hal penting kalau Mas Wahyu bilang kejadian di Lombok seolah pemerintah tidak menganggap penanganan *shelter* itu satu hal yang urgent dalam

rangkaian manajemen penanganan darurat bencana saya lihat perkembangannya justru dibelakangan ini ada hal yang lebih menakutkan ketika anggapan BNPB bahwa *shelter* itu dapat diganti dengan DTH dana tunggu hunian jadi kembali lagi kepada apa yang disampaikan Pak Dave bahwa orang seolah melihat siapkan tempat tinggal urusan selesai padahal kan tidak sesederhana itu kita tahu bahwa kita ingin menbangun masyarakat yang tangguh dan resilien justru mereka setelah mengalami bencana, kalau mereka belum mengalaminya itu baru kita bisa melabelinya sebagai kesiapsiagaan pada tujuan akhir kita untuk setiap penanggulangan bencana itu kita harus membangun ketangguhan di masyarakat, nah ketangguhan itu tentunya dimulai dari semangat bangkit, bangkit dari keterpurukan ketika mereka mengalami bencana nah prosesinilah yang mengantarkan mereka nanti bisa lebih adaptif lebih menyesuaikan diri dari ancaman-ancaman berikutnya, jadi lebih setuju yang pak wahyu bilang bahwa kita melihat multihazard ini menjadi salah satu faktor penentu karena hari ini boleh jadi satu wilayah mengalami satu jenis bencana tetapi belum berakhir mungkin 2-3 tahun kedepan atau 2-3 bulan kedepan dia akan mengalami bencana lain, itu tergambar jelas sekali ketika saat ini kita melihat bagaimana kita di tengah-tengah bencana pandemic covid19 yang ternyata bencana beruntun juga bisa terjadid 2 jenis bencana ini saja sudah menjadi masalah besar ketika kita bicara *shelter* karena seringkali orang berfikir memindahkan penyintas dari daerah berbahaya ke daerah aman itu sudah selesai mereka lupa bahwa bukan hanya orangnya yang kita pindahkan tetapi juga masalah juga harus kita pindahkan dan juga kita pilah untuk kita selesaikan satu persatu katakana misalnya mereka itu tinggal di daerah sebelum dipindahkan mereka adalah penderita penyakit akut yang secara rutin mereka meminum obat secara rutin untuk bertahan hidup tapi ketika mereka pindah di *shelter* di hantara atau di penampungan atau di kamp informasi itu tidak terbawa sehingga mereka nanti banyak korban yang meninggal justru setelah di pengungsian bukan akibat langung daripada bencana, nah hal-hal semacam ini sebenarnya menjadi konsern yang harus kita tangani dan masih banyak lagi masalah lainnya yang perlu kita tangani lagi selama proses penanganan *shelter* ini, ini mungkin menjadi menarik. Saya berharap memang lewat kajian ini, mas amri, kita bisa menawarkan satu model yang ideal artinya setidaknya walaupun tidak untuk skala tertentu tapi ada standar minimal yang bisa kita tawarkan penanganan *shelter* itu seperti ini model kolaborasinya seperti ini sehingga nanti tidak ada anggapan bahwa seperti tadi yang saya bilang bahwa BNPB menyiapkan dana tunggu hunian 500 ribu per kk itu urusan sudah selesai, tujuan dia mungkin bagus karena ingin mempercepat nanti proses pembangunan hunian tetap, tetapi perlu kita pahami sebelum mereka mendapatkan hunian tetap itu mereka secara psikologis harus disembuhkan traumanya kemudian secara ekonomi mereka harus kita minimal mampu mendorong livelihood nya dan daya beli mereka sebelum mereka benar-benar nanti harus berjuang sendirian menghadapi masalah-masalah lain yang lebih jauh dan lebih panjang, nah hal-hal semacam itu perlu di apa, nah munculnya sekarang pokja selain klaster yang sudah kita kelola seperti ini misalnya seperti di pokja bnatu pokja masyarakat kemudian ada lagi pokja untuk perlindungan kelompok rentan ini menjadi satu bukti bahwa *shelter* itu tidak hanya sekedar tempat tinggal bukan hanya sekedar masalah sosial bukan hanya sekedar masalah ekonomi tetapi keleluaran masalah yang disandang oleh para penyintas untuk menuju ketangguhan mereka nanti untuk menghadapi kejadian bencana selanjutnya. Mas amri mungkin bisa kasih kita tambahan catatan untuk, saya mungkin lebih apa bagaimana kondisi idealnya, kemarin saya ada nanti saya share disini di chat.

Pak Antonn: Pak Nelwan mohon ijin, menarik banget sebetulnya topik penelitian Pak Nelwan ini, dan membuat semakin tergoda untuk terksplor lebih lanjut. Jadikan kalau missal saya pahami yang Pak Nelwan pingin teliti itu kan bagaimana *Collaborative Governance* itu bisa berjalan mengambil studi kasus *shelter* tempatnya di NTB, waktu kemarin itu waktu Pak Nelwan share filenya akhirnya saya berfikir sebenarnya udah banyak publikasi-publikasi yang menjelaskan tentang bagaimana pola kerja di suatu aliansi atau koalisi. Sekarang banyak banget lembaga-lembaga yang gak bekerja sendirian akhirnya dia berkolaborasi, saya baca-baca ada hal yang muncul ada rasa trust ada saling menghargai punya pemahaman bersama dst, tapi selain itu dia juga harus punya pembagian peran penguatan kapasitas dan juga perencanaan bersama. Saya coba melihat apa saja dulu komponen-komponennya, tapi juga selain melihat komponen apa sih hal yang mendorong dan inikan kalau misalnya bekerja bersama berarti ada 2 atau lebih lembaga yang masing-masing punya prioritas sendiri-sendiri, tapi pada saat topik ini ada merger mungkin gak semua prioritas itu sama dengan

satu lembaga sama lainnya tetapi resep untuk bisa berhasil adalah hal-hal prioritas yang sama itu lebih besar dibandingkan di luar dari prioritas. Akhirnya saya melihat membaginya sesuai dengan kerangka yang Pak Nelwan usulkan bahwa di satu sisi lembaga-lembaga ini harus punya tujuan yang sama dengan tujuan yang sama berarti harus punya trust, prinsip-prinsip yang sama, budaya yang sama dan juga visi jangka panjang, terus ada struktur dalam artian harus ada aturan main gak bisa tiba-tiba yang satu jalan dengan yang lainnya, nah ini mungkin perlu bisa digali lagi mungkin apakah ini perlu formal atau informal, terutama dalam konteks NTB dan *shelter*, perlu ada perencanaan bersama, proses-proses pengambilan keputusan, dan juga kalau misalkan ada masalah gimana ini mengatasinya. Lalu kemudian kalau untuk komunikasi multi arah itu planningnya mereka harus bisa asik kerja bareng, komunikasinya lancer, harus ada refleksi, ada evaluasi, ada perbaikan, dan juga ada pembagian peran, dan juga di aspek pembagian sumber daya kegiatan keberhasilan tentunya ada saling bagi-bagi misalnya finansial atau waktu ada penguatan kapasitas kolaborasi bersama ratinya bareng-bareng, mungkin aja dalam suatu penanganan *shelter* itu mereka kerjanya sendiri-sendiri cuma terkoordinasi tapi juga akan lebih baik kalau misalnya ada kegiatan bersama-sama, contohnya di Sulteng ada perempuan pelopor rekonstruksi, itu saya melihat menarik kalau misalnya ada komponen itu dimana ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama-sama jadi gak Cuma pilah pilah wilayah kerja saja atau menyusun standar tapi ada yang dikerjakan bareng-bareng dan juga ada dimana kita bisa merayakan keberhasilan bersama-sama, jadi gak Cuma satu lembaga selesai dah gitu, tapi ada spirit dimana bahwa achievement itu dirasakan bersama. Nah ini yang menurut saya komponen-komponen collaborative government itu bisa berjalan mulus atau lancer. Tapi tadi setelah mendengar Dave dan Wahyu, Mas Wahyu juga bergerak ke tambahannya nih, bahwa mungkin itu merupakan bagian dari faktor penentu bagaimana jenis bencananya dampak bencananya, tadi juga dave bilang tentang bahwa tadi itu skalanya kecil nih ya di banding tsunami atau juga jogja, mas wahyu tadi bilang kemungkinan pergantian staf yang tidak terduga, pengaruh terhadap pengambil keputusan, bagaimana si pembisiknya itu siapa sih yang kemudian mempengaruhi misalnya itu semua gak dipegang itu akan berpengaruh dinamika nya. Juga dave tadi bercerita si lembaga-lembaga yang terlibat juga itu berpengaruh baik dari pengalaman mereka kapaistas mereka dan juga relationshipnya, hubungan mereka dengan antar lembaga. Saya tambahkan disini kontak mengenai persamaan paradigm mungkin khusus untuk *shelter* karena dave tadi menekankan bahwa antar lembaga itu sebenarnya pemahaman *shelter*nya juga masih beda-beda nih, nah mungkin untuk mencapai collaborative govenance yang efektif itu perlu usaha lebih lanjut lagi untuk memastikan paradigm kita sama dan tadi terakhir Pak Nelwan bilang bahwa semua ini itu harus lintas sector tidak bisa hanya *shelter* saja yang bergerak tapi juga berpengaruh dengan sector-sektor lainnya. Saya tambahkan juga ini ada opsi-opsi intervensi sebagian bagian dari perencanaan yang mungkin perlu jadi bagian pertimbangan untuk kerangka berfikirnya.

Pak Wahyu: Ketika menyampaikan ada semacam komitemen atau dalam lembaga disebutnya protokol, kita semua punya kesepakatan satu protokol isinya join need assessment diantaranya juga ada tentang hazard, kesepakatan semacam kontijensi plan, rencana kontijensi untuk *shelter* untuk pemerintah ada apa enggak, artinya itu dibicarakan gak dengan multi sector atau lintas kementerian yang ada, jangan sampai kementerian punya arah atau persepsi yang beda-beda terkait *shelter* sehingga opsi tidak muncul.

Pak Nelwan: Justru disitu tantangannya sampai hari ini kita belum punya model itu, maka dari itu saya tertarik mengangkat ini kedalam kajian ilmiah, saya harap nanti saya dorong jadi usulan rekomendasi kebijakan. BNPB kemarin sepakat koordinasi klaster tetap ada di BNPB tetapi untuk koordinasi antar klaster di koordinir Kemenko PMK artinya ada cukup ruang untuk kita nanti mengintervensi kebijakan-kebijakan dimana nanti kita bisa membuat standar baku, artinya kalau kita punya pola penanganan semacam itu setidaknya nanti dijadikan pedoman bagi semua orang dan juga pemerintah daerah ketika mereka melaksanakan fungsi peran pemerintah daerah di dalam penanggulangan bencana sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah harus menjalankan pengarusutamaan urusan penanggulangan bencana itu menjadi urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Sangat sulit bagi kita mengharapkan hal-hala semacam itu kalau uaraian spm seperti yang kita baca dalam permendagri nomor 101, sama sekali tidak standar diserahkan begitu saja, dan itu

sebenarnya paling tidak kita sudah 3 kali dapat masalah besar pemerintah Cuma mungkin gak pernah menengok kebelakang bagaimana pengungsi sinabung menggugat pemerintah menganggap penanganan tidak sesuai yang seharusnya, bagaimana penyintas paska konflik di ambon menggugat pemerintah dan akhirnya mereka memenangkan gugatan itu di pengadilan dan akhirnya pemerintah membayar dengan sangat mahal atas ganti rugi yang dianggap kerugian bagi mereka. Kalau kita punya standar-standar yang bagus artinya kan dari awal kita bisa membangun komunikasi multi arah tadi bukan hanya kepada pelaku saja tapi juga pada para penerima manfaat karena prinsip-prinsip di manajemen *shelter* yang tadi kita bilang sebagai proses, nah masyarakat bukan hanya sebagai objek sasaran program dan juga pelaku yang harus kita berikan tempat dalam proses-proses pemulihan penguatan kapasitas itu, dan menurut saya yang permanen ada disitu. Tapi yang pasti ketika masyarakat itu sudah mampu memahami proses *shelter* itu satu penguatan kapasitas proses bagi mereka untuk pemulihan proses untuk bagi mereka untuk bisa lebih tangguh saya kira itu jauh lebih kuat lebih permanen karena kalau kita lihat hazard di Indonesia itu permanen, solusinya juga harus kita berikan yang permanen baru nanti ada penyelesaiannya. Ada hal yang menurut kita sudah terlihat didepan mata yaitu ancaman megathrust, apakah kita hanya diam menunggu kejadian tersebut terjadi, menurut saya itu satu peristiwa yang menggerikan bahkan jauh lebih besar dibandingkan aceh karena yang terpapar itu sebagian banten dan hi jakarat sampai ke lampung, itu akan jadi jutaan manusia mati sia-sia kalau tidak kita siapkan sesuatu yang bisa kita acu. Mungkin ini adalah gerakan kecil yang coba saya buat yang mungkin nanti bisa menjadi pemicu buat teman-teman di masyarakat sipil untuk mendorong nanti untuk bagaimana kita punya pola yang baik.

Pak Dave: Saya melihat salah satu kesulitan Palu dan Lombok muncul, kita belum ada kesepakatan tentang haka tau peran klaster sama BPBD masih sangat abu-abu, kalau saya melihat sistem global niasanya dipusatnya di OCHA atau coordinator total, kalau coordinator sector karna kita tahu ada hal teknis khusus setiap sector itu alasan kita punya sistem klaster supaya diskusi teknis-teknis nya muncul di sector, diskusi tentang manajemen tentang koordinasi tentang seluruhnya itu ditengah sebenarnya itu fungsi ada BPBD, koordinasi dengan smeuanya seharusnya ada disitu, menurut saya kiprahnya paling penting, karena asset-asset milik nonpemerintah sebenarnya agak sulit mereka mau kasih atau tidak, jadi manajemen pemerintah manajemen asset-asset dan kemampuan pemerintah dalam koordinasi seluruhnya, tapi hal teknisnya seharusnya ada di klaster supaya klaster hunian klaster wash atau klaster apapun bisa ada membangun kemampuan komunitasnya selamanya supaya mereka semuanya menjadi lebih pintar kemampuannya lebih tinggi dalam penanganan. Kalau yang saya lihat yang terjadi di Palu dan Lombok semuanya agak bingung, kalau saya lihat dari aspek kepemimpinan kolektif nya aturan main bersama, mereka bingung harus ikut klaster atau tidak, jadi belum jelas diskusi ini harus muncul dimana dan juga karena itu mereka tidak punya aspek visi dan prinsip bersama karena ada yang ikut klaster ada yang tidak ada yan di diskusi langsung bersama pemerintah daerha atau BPBD ada yang diskuis bersam aklaster dan ini menjadi agak sedikit kurang jelas, dan buat saya kalau sudah menjadi jelas sekali siapa pun di inodnesia yang mau melakukan kasih bantuan *shelter* saat bencana harus dari klaster *shelter* dan sampai selamanya sebelum bencana mereka mulai kerja bersama ikut diskusi bersama mereka akan punya visi bersama maupun kementrian atau lembaga atau siapapun, kalau mereka lebih diatur untuk main bersama dan ditulis bersama saya melihat itu menjadi hal yang sangat kunci. Yang kedua adalah situasi politik, sesuatu yang sangat jelas untuk saya Pak Nelwan, kita punya BPBD dan BNPB, BPBD buat renkon tapi sebenarnya ada bencana besar mereka tidak akan punya kontrol atau command, BNPB akan dating, tapi kalau itu cukup besar pemerintah Presiden akan point seseorang sebagai manajer bencana, membayangkan skala bencana Jakarta tidak mungkin BNPB akan menjadi manajer mungkin menko pmk atau polhukam akan menjadi coordinator atau mungkin ketua dari militer. Bagaimana kita bisa memastikan orang itu sudah tau tentang sistemnya dan sistem koordinasi dan kalau kita mau memastikan *Collaborative Governance* lalu memastikan siaapun yang dipasang di posisi itu sudah mengerti, sistem Indonesia harus sangat jelas dan sudah diatur sistemnnya. Sekarang masih beberapa daerah sistem bencana yang benar-benar masih sangat abu-abu, kapan BPBD punya tanggung jawab untuk koordinasi total, kapan BNPB siapa yang bisa mengaktifasi klaster kapan indicator apa bantuan internasional atau tidak, beberapa hal ini yang masih kurang jelas yang dapat merusak kolaborasi.

Pak Antonn: Kadang-kadang saya merasa secara personal mungkin Indonesia memang mendesain sistemnya untuk abu-abu, bahwa ketidakjelasan itu by design, sehingga poinnya kembali ke Mas Wahyu siapa sih pembisiknya siapa sih orang yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan itu menjadi hal yang signifikan baik dari semua penanganan bencana yang seharusnya jelas struktur posko jelas kadang-kadang harus berbisik kepada BPBD untuk nanya program nya udah ada atau belum ya, jadi memang itulah situasinya seperti, tandanya mungkin apakah jalurnya berusaha membuat itu jelas atau jalurnya berusaha bagaimana kita untuk beradaptasi dengan ketidakjelasan itu.

Pak Nelwan: Kita tetap harus ada ruang, kita mampu merubah sedikit demi sedikit yang akan menghasilkan sesuatu yang akan berguna, saya melihat mungkin kondisinya seperti itu dibuat abu-abu supaya ada ruang bahkan kalau kita lihat sekarang ada BNPB untuk menempatkan deputi kedaruratan militer aktif. Tetapi saya kira saya membuka ruang untuk mendorong masyarakat sipil untuk bersama-sama.



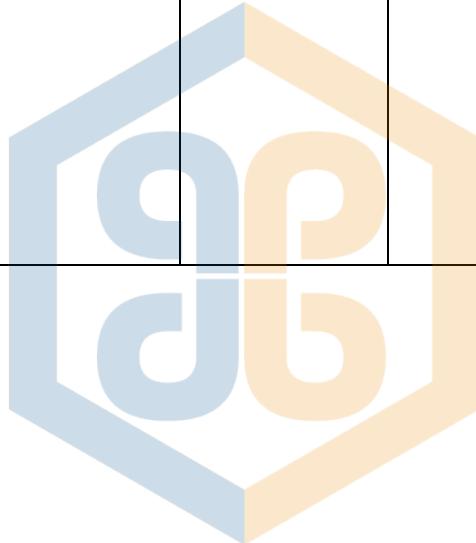
**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Lampiran 4 Data Primer Hasil Wawancara dengan Narasumber Kunci dan Penerima Manfaat

Transkrip Wawancara dengan Informan Narasumber Kunci

Tanggal wawancara	Nama Institusi/Le mbaga	Apa peran unit kerja Anda dalam penanganan <i>shelter</i> bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?	Bagaimana menetapkan tujuan dalam penanganan <i>shelter</i> bagi penyintas gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?	Pihak mana saja yang terlibat dalam penanganan <i>shelter</i> bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018 (Kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Daerah, LSM nasional, LSM internasional, swasta)?	Apakah semua terlibat dalam kepemimpinan penanganan <i>shelter</i> bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018?	Bagaimana komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan <i>shelter</i> bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018 (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)?	Apakah masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya dalam penanganan <i>shelter</i> bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018 (sumber dana, SDM, teknologi, manajemen)?	Permasalahan apa yang ditemukan dalam penanganan <i>shelter</i> bagi penyintas bencana gempa bumi di Provinsi NTB?
15/04/2021	Perwakilan Build Change	Pelatihan Konstruksi Aman Gempa, untuk tukang, pemerintah setempat, dan pemilik rumah	Dibahas dalam Forum Rapat yang diwakili oleh pemerintah, NGO, dan Donor baik dari Dunia Usaha maupun komunitas lokal	Dinsos Provinsi NTB, NGO, Donor dan Penerima manfaat <i>Shelter</i> .	Ada perwakilan Pemerintah, NGO, Donor dan Komunitas Lokal	Rencana disusun bersama oleh perwakilan pihak yang terlibat dalam penanganan <i>shelter</i>	Masing-masing pihak yang terlibat ada yang menyumbang tenaga, ada yang memberikan pendampingan teknis, ada yang	Kurangnya pilihan untuk para penyintas untuk membangun rumahnya kembali secara mandiri

--	--	--	--	--	--	--	--	--



menyediakan
dana, ada yang
menjadi
pelaksana
pembangunan,
ada yang
mendampingi
penyintas.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

15/04/2021	Perwakilan UN OCHA	Memfasilitasi koordinasi para penggiat bencana dari Pemerintah dan non-pemerintah.	Pemerintah Pusat dengan cepat menentukan bantuan <i>shelter</i> , yang memberikan harapan bagi masyarakat untuk kembali hidup normal seperti sebelum bencana. Namun pemberian bantuan tersebut dirasa kurang melibatkan / mendengarkan aspirasi dari masyarakat terdampak, sehingga ketepatan pemberian bantuan <i>shelter</i> perlu menjadi pembelajaran.	Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, LSM nasional, LSM internasional, swasta, lembaga keagamaan, dan ormas.	Secara umum komunikasi berjalan baik, dengan harapan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembelajaran dapat lebih dikedepankan.	Secara umum komunikasi berjalan baik, dengan dinamika perbedaan pendapat yang sehat/konstruktif. Komunikasi dalam hal perencanaan sempat terkendala dikarenakan keputusan yang terkesan 'top down' dari Pemerintah Pusat, yang berdampak pada proses komunikasi selanjutnya.	Ya secara umum; local wisdom perlu lebih ditingkatkan, peran akademisi juga perlu lebih dikedepankan.	penentuan dampak kerusakan, penetapan desain dan jenis <i>shelter</i> , penyampaian informasi terkait <i>shelter</i> kepada masyarakat perlu lebih gencar, dengan melibatkan kepala pemerintahan paling bawah, dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Selain itu, pengawasan struktur <i>shelter</i> yang tahan gempa, dengan standar-standar yang telah ada. Masih ditemukannya pembangunan kembali <i>shelter</i> dengan bahan asbestos yang berbahaya.
------------	--------------------	--	--	---	--	--	---	--

19/04/2021	Perwakilan Rumah Zakat	Penyediaan <i>shelter</i> sementara	Melihat kebutuhan warga menanti tersedianya hunian tetap	Pemerintah daerah Lombok Utara dan lembaga swasta	Terlibat	Saling berkoordinasi	Berkontribusi	Tidak ada
15/04/2021	Perwakilan PSE DENPASAR	Manager Proyek	melakukan kajian di beberapa kelompok, (usia, gender, stake holder)	LSM Nasional (karina), Swasta (keuskupan lain), LSM Internasional (caritas itali, hongkong)	Kepemimpinan diserahkan pada tim yg sudah dibentuk. dengan pendampingan KARINA	Luar biasa baik, semua terstruktur dan terkoodinir	Semua berkontribusi, mulai dari pelatihan, perencanaan, dana dan SDM	Penolakan dari penerima manfaat
15/04/2021	Perwakilan World Food Programme	Dukungan teknis logistik, meliputi pemetaan kapasitas logistik, identifikasi kesenjangan dan penyusunan konsep operasi logistik, termasuk penentuan jalur distribusi ke titik-titik pengungsian	Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat (hutang atau hutara) berdasarkan kajian kerusakan	Kemensos, PUPR, Kemenko PMK, BNPB, PemProv/PemKab /PemKot, PMI/IFRC, IOM, dll.	Tidak semua, hanya PMK, Kemensos dan BNPB yang berinisiatif memimpin	Berjalan sangat baik melalui mekanisme Klasnas PBB, rapat antar klaster, rapat K/L, rapat Posko, dll.	Ya, tergantung kapasitas dan mandatnya	Keputusan antara hutang dan hutara yang cukup membingungkan hingga keluarnya keputusan Gubernur

15/04/2021	Perwakilan Muhammadiyah Disaster Management Center	Koordinator Tim Kesehatan	Di tengah fase tanggap para tokoh warga penyintas di ajak duduk bersama dalam membahas perencanaan dan bentuk dari <i>Shelter</i> yang akan di bangun bagi mereka.	Dinsos, BPBD NTB, PMI, IFRC, CRS, Muslim Aid, Islamic Relief, dan para anggota dari Humanitarian Forum Indonesia	Tidak semua. Karena batasan otoritas dari lembaga bagi perwakilan disana.	Dengan adanya koordinasi klaster PP melalui Kemensos, semua dapat terukur dan ditinjau. Walau adanya dua pos koordinasi yaitu: Pos Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Poskogasgabpad) dan Pos Pendamping Nasional (Pospemas), bagi LSM lebih terkoordinir melalui klaster PP.	Tersedia, sumber dana dari himpunan infak dan donasi jamaah dan warga. Mobilisasi Relawan terpadu dari internal. Manajemen dengan pendekatan assistensi dari pusat berkolaborasi dengan warga lokal bagian dari penerapan pelokalan (localization).	Alur Komunikasi dan koordinasi yang perlu di tingkatkan dengan pendekatan klaster / sektor bagi semua kalangan (kolaborasi multi-pihak/stakeholders).
------------	--	---------------------------	--	--	---	---	---	---

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

15/04/2021	Perwakilan Habitat for Humanity Indonesia	Memberikan bantuan Toilet Keluarga, Transitional <i>Shelter</i> , membangun reservoir air dan jaringan pipa untuk melayani 1 desa	Tidak paham konteks pertanyaannya namun semoga menjawab. Menetapkan tujuan sesuai dengan fokus organisasi yaitu mengajak semua orang untuk membangun hunian layak huni dan prasarana yang menunjang hunian seperti akses ke air bersih dan sanitasi. Kegiatan, metode dan pendekatanyang dilakukan disesuaikan dengan konteks bencana, kebutuhan, sumber daya dan budaya setempat	selain semua yang disebutkan di atas juga TNI/Polri, Akademisi dan Donor	Tidak (kalau yg dimaksud adalah kepemimpinan)	Komunikasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan memiliki tingkat dan jenis kesulitan, pembelajaran, kesuksesan dan tantangan yang berbeda-beda. Ada yang baik tapi ada juga yang perlu diperbaiki	Tentunya masing-masing memiliki tingkat kontribusi sumberdaya yang berbeda-beda	Tidak adanya program hunian sementara dari pemerintah, Pemerintah pusat yang langsung berjanji akan bangun hunian tetap tanpa menyadari tingkat kesulitan dan kebutuhan, suplai/stok semen yang bersaing dengan sirkuit dll
------------	---	---	---	--	--	---	---	---

15/04/2021	Perwakilan IFRC	mengkoordinasi aktor/lembaga yang melakukan intervensi <i>Shelter</i> di NTB melalui koordinasi rutin Sub Klaster <i>Shelter</i>	Penetapan tujuan dan perencanaan kegiatan selalu didiskusikan bersama dengan Kementerian Sosial selaku koordinator Sub Klaster <i>Shelter</i> (dalam hal ini PSKBA), dan juga dengan anggota Sub Klaster <i>Shelter</i> . Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan masukan dan melihat potensi kolaborasi dan kerjasama antar aktor/lembaga	Kementerian/lembaga pusat (Kemensos, PUPR), Pemerintah Daerah (Dinsos, Dinas PU dan tentunya juga Posko Koordinasi Respon Bencana NTB), LSM nasional, LSM internasional, swasta	Dalam hal ini, Dinas Sosial Provinsi menjadi koordinator dalam sub Klaster <i>Shelter</i> di NTB	Sub Klaster <i>Shelter</i> bersama dengan Dinas Sosial Provinsi melakukan/mengorganisir pertemuan rutin dengan anggota sub klaster <i>Shelter</i> di NTB. Hasil dari pertemuan digunakan secara bersama untuk meningkatkan kolaborasi dan percepatan untuk pemenuhan hunian di NTB pada saat itu.	Pertemuan koordinasi rutin Sub Klaster <i>Shelter</i> di NTB pada saat itu, salah satunya adalah membahas tentang siapa melakukan apa dan dimana, hal ini adalah merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sumber daya yang tersedia di masing masing lembaga/organisasi. Hal ini juga dilakukan untuk dapat mengalokasikan resources yang ada, sehingga tidak tumpang tindih dan juga potensi untuk kolaborasi dalam intervensi <i>Shelter</i> .	Adanya potensi kesenjangan pada saat itu dalam pemenuhan hunian sementara, dimana masyarakat terdampak mempunyai waktu tunggu untuk kemudian dapat menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dinas Sosial Provinsi NTB pada saat itu, mengeluarkan Surat Edaran, tentang dorongan kepada lembaga lembaga non pemerintah, untuk dapat mengalokasikan dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan hunian (individu) dan segera memberikan perlindungan yang baik kepada keluarga keluarga penyintas. Surat Edaran ini, merupakan praktek baik dan merupakan keberanian dari pimpinan Dinas Sosial pada saat itu untuk melakukan dorongan ini. Tentunya hal ini mendapatkan apresiasi baik dari lembaga lembaga yang sedang melakukan intervensi di NTB pada saat itu.
------------	-----------------	--	---	---	--	---	---	---

19/04/2021	Perwakilan Humanitarian Forum Indonesia	Koordinasi dan Manajemen Informasi	berdasarkan kebijakan dan program masing-masing anggota dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan advokasi bersama Sub Klaster Shelter	BNPB, Kemensos, KemenPUPR, TNI, Pemprov dan Pemkab, LSM nasional, LSM internasional, Palang Merah, Ormas, Badan PBB, Lembaga internasional, perguruan tinggi, dan lembaga usaha	Tidak semua, berdasarkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang berlaku saat itu	Dalam koordinasi Sub Klaster Shelter baik di tingkat pusat, maupun di tingkat provinsi, yang difasilitasi oleh IFRC, namun hanya sampai di pelaksanaan	Iya, masing-masing berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya	Kebijakan pemerintah yang langsung mengarah ke hantap, namun proses pembangunan hantap lebih lama dari jadwal. Proses verifikasi penerima manfaat yang cukup lama untuk masuk dalam daftar penerima hantap maupun Dana Tunggu Hunian. Pihak non-pemerintah belum banyak dilibatkan untuk proses hunian sementara.
16/04/2021	Perwakilan LPBI NU	Menyediakan tempat, membangun <i>shelter</i> , memenuhi air bersih dan Food item serta pelayanan kesehatan	Tujuan ditetapkan melalui pertama Data kaji cepat (sitrep) dari internal kedua data yg tersedia dari pemerintah yg punya berwenang, dan ketiga koordinasi dg multi stakeholder (LSM/Ormas lainnya)	Pemerintah pusat (BNPB, Kemensos RI, Kemenkes RI), pemerintah daerah, TNI, polri dan dunia usaha	Iya terlibat	Semua unsur stakeholder tergabung dalam posgab untuk melaporkan secara rutin aktivitas organisasi masing-masing, dan berbagi informasi penting	Iya berkontribusi	Tempat lokasi <i>shelter</i> yg berada dalam lapangan luas, dengan kecepatan angin laut maka otomatis cepat merusak <i>shelter</i>

16/04/2021	Perwakilan Yayasan Arkom Indonesia	Pembangunan Huntara (tanggap darurat), Pembangunan 8 Unit RTG didusun Orong nagasari desa lading-lading Tanjung, Pembangunan 78 fasilitas pelengkap RTG didusun Orong nagasari, perbaikan sektor ekonomi (Bantuan bengkel kayu, LKK (Lembaga keuangan kampung dan Kelompok Tani Madu) dusun orong nagasari	Mengadakan pendekatan secara individual dan bekerja sama dengan LSM Lokal	Pemerintah Pusat, Pemda, Lsm Nasional, LSM Lokal dan Pihak2 Swasta	Iya	Komunikasi sangat bagus dan Yayasan Arkom Indonesia, sendiri sempat bekerja sama dengan Yayasan Sheep Indonesia utk pembangunan 100 Unit Toilet dikecamatan kayangan, kab. Lombok utara.	Iya	Permasalahan yang masih ada di Lombok Utara (Sebagai titik utama gempa dan daerah paling terdampak) masih banyak Hunian RTG (Bantuan pemerintah) yang sampai saat ini belum terealisasi.
------------	------------------------------------	--	---	--	-----	--	-----	--

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

	Perwakilan ARTAGRAH A PEDULI	Donor Pembangunan Huntara, Penyediaan air bersih dan Sanitasi dan bantuan logistik pangan bagi penyintas; Ikut memberi masukan dalam penyusunan rencana penanganan <i>Shelter</i> ; 1. Memantau perkembangan penanganan <i>shelter</i> di lapangan; Mengikuti Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Sub-Klaster <i>Shelter</i>	Semua perwakilan yang terlibat dalam penanganan <i>shelter</i> diajak memberi saran masukan.	Ada kementerian social, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa lembaga Bank, beberapa perusahaan,tapi yang paling banyak itu NGO dan relawan.	Ada perwakilanlah walaupun tidak semua, dari pemerintah juga ada, dari NGO Juga ada, ada juga dari perusahaan perwakilan relawan juga ada dalam kepengurusan <i>shelter</i> di NTB.	<p>1. Ada Rapat Rutin setiap Minggu yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bersama Kementerian Sosial, perwakilan baik donor, pelaksana, pendamping dan relawan juga hadir dan ikut berdiskusi.</p> <p>2. Ada juga diskusi sesama NGO dan Pelaksana pembangunan <i>shelter</i> dan pendamping penanganan <i>shelter</i> 2 kali seminggu.</p> <p>3. Ada pertemuan diskusi antara donor dengan pelaksana dilapangan dan melakukan peninjauan bersama dan dialog dengan penyintas penerima <i>shelter</i>.</p>	<p>Saya lihat walaupun tidak merata masing-masing pihak ikut menyumbang, misalnya pemda memberi ijin, ada donor yang menyumbang dana, ada lembaga yang membantu membuat design, ada yang mencari dana dan melaksanakan pembangunan, ada yang menjadi pendamping, ada yang jadi relawan jadi pekerja saja, calon penerima <i>shelter</i> juga ada yang ikut bantu kerja dan mendapat upah.</p>	<p>1. Awalnya kita bingung karena BNPB katakan tidak ada pembangunan hunter pada hal banyak sekali warga masyarakat yang rumahnya rusak dan tidak punya tempat tinggal.</p> <p>2. Akhirnya masyarakat tinggal di penampungan sementara secara bergerombol dan berdesak-desakan. Ada yang tinggal di tenda dan tendanya sudah mulai rusak.</p> <p>3. Ketika pemda memberi ijin membangun hunian sementara susah sekali cari bahan bangunan, kalaupun ada harganya sangat mahal.</p> <p>4. Lokasi juga sulit di cari, kadang yang punya tanah minta harus di sewa, kalau dibangun di tanah warga pemilik rumah yang rusak mereka masih takut karena puing dan reruntuhan rumah mereka masih ada di situ. Kalau petugas mau merobohkan untuk pembersihan yang punya rumah menolak karena berharap rumahnya masih bisa diperbaiki dan masih ada barang milik nya yang tersisa di dalam rumah.</p> <p>5. Bantuan juga masih jalan sendiri-sendiri, bahkan seperti adu cepat-cepatan.</p>
--	------------------------------	--	--	--	---	---	---	---

	Koordinator Klaster Perlindungan dan Pengungsi an, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos	<p>Melakukan penanganan segera layanan <i>shelter</i> darurat, Mengidentifikasi kebutuhan <i>shelter</i>, Menetapkan tujuan bersama multi sektir penanganan <i>shelter</i> di NTB, Aktivasi Sub Klasnas <i>Shelter</i>, Identifikasi kemampuan 5W sub klaster <i>shelter</i>, Menyepakati SOP bersama sub klaster <i>shelter</i>, Melakukan intervensi <i>shelter</i> bersama multi sektor</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi kegiatan sheter di NTB</p> <p>9. Mengokoordinasikan tindak lanjut bersama Kemnko PMK</p>	<p>Tujuan dikaji berdasarkan permasalahan yang ada. Khusus di NTB, kebijakan Nasional tidak ada Huntara langsung Huntap. Namun demikian sub klaster <i>shelter</i> atas persetuan Kemenso PMK tentap memberikan layanan Huntara melalui surat edaran Dinas Sosial Provinsi NTB. Hal ini membuktikan penetapan tujuan berdasarkan kebutuhan riel di lapangan, selain memperhatikan kebijakan Nasional</p>	<p>Keterlibatan pihk dsalam sub kalster shleter di NTB : PMI, Dompet Duafa, Baznas, MDMC, IFRC, IOM, BNI, Bank Mandiri, BRI, Kemenko PMK, Kemensos, KPPPA, dll (tidak kurang dari 82 lembaga) khusus bergerak di <i>shelter</i></p>	<p>Iya, Kementeris Sosial selaku koordinator Sub Klaster <i>Shelter</i> mengkoordinir sejak awal samai dengan selesai pascaca bencna didampingi oleh Kemko PMK</p>	<p>Komuminkasi dilakukan secara berkala, 2 kali dalamsatu minggu dilakukan dilokasi bencana untuk membahas hal hak teknis termasuk perkemabngan dan gap penanganan, silih berganti menjadi tuan rumah. Namunn yang menjadi pokso di Kantor Dnas Sosial Provinsi NTB, dengan arahan Kemenko PMK</p> <p>2. Komunikasi tngkat Nasional juga dilakukan secara berkala 1 minggu sekali dikoordinir oleh Kementeran Sosial untuk mengetahui gap di lapangan serta dukungan yang dapat diberikan, dengan arahan Kemenko PMK</p>	<p>Fungsi dari klaster adalah salah satunya untuk pengerahan sumber daya untuk pelayanan penyintas bencana. Karenanya di NTB pengerahan sumber daya sangat banyak, bahkan samoai dengan saat ini masih terus dilakukan pengerahan sumber daya terutama untuk pembangunan Huntap. Adapun bentuk pengrehan sumber daya berupa :</p>	<p>1. Kebijakan nasional tidak memberlakukan huntara menjadi kendala karena masyarakat sangat membutuhkan Huntara, sehingga kami berinisiatif untuk mengekuarkan surat rdaean dari dinas sosial provinsi NTB tentang bolehnya para multi pihak sub klaster shleter melakukan program Huntara.</p> <p>2. Belum semuanya frame tentang <i>shelter</i> sebaga suatu proses bukan produk masih terbatas sehingga penghargaan terhadap <i>shelter</i> partisipatif dan lebih manusiawi menjadi kendala.</p> <p>3. Pasar waktu itu melaukan kenaikan harga sehingga menyulitkan pengadaan bahan</p> <p>4. Penggunaan asbesos menjadi kendfsla tersendiri karena berbahaya bagi kesehatan, sehingga kami mengeluarkan surat dari Dinas Sosial Provinsi untuk tidak menggunakan bahan asbesos dalam Huntara maupun Huntap</p>
--	--	---	--	---	--	--	---	---

16/04/2021	Direktur Penanganan Kedaruratan Bencana BNPB	Menyiapkan hunian sementara dan kebutuhan dasar bagi Pengungsi	Dengan rapat koordinasi antara pusat dan daerah	Kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, LSM nasional dan internasional	Terlibat semuanya	Diadakan rapat persiapan dan evaluasi	Tenaga ahli manajemen shelter, bantuan non tunai, pelibatan masyarakat, dan bantuan teknis lainnya	Masih banyak data ganda bagi penerima bantuan perbaikan rumah
------------	--	--	---	---	-------------------	---------------------------------------	--	---



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

20/04/2021	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kordinator <i>Shelter</i> NGO, Penyediaan <i>Shelter</i> , pemenuhan kebutuhan makan melalui Dapur Umum, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar Penyintas melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, PDAM, PLN, Pertamina, IOM, IFRC/ PMI.	Berdasarkan hasil kesepakatan dengan BPBD dan Perwakilan Penyintas, yaitu melindungi para penyintas dari cuaca serta memberikan tempat berlindung yang layak dan bermartabat.	Kementerian/ Lembaga Pusat : Kementerian Sosial, BNPB, Kemenko PMK. Pemerintah Daerah : BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim. LSM Nasional : PMI, ADRA, Habitat LSM Internasional : IOM, IFRC, UNICEF. Swasta : PLN, PDAM, Pertamina, Wings. Kelompok Komunitas : Klub Motor, klub mobil, klub Alumnus SMANSA Mataram. Peeguruan Tingg : KSR Unram, UKM Unram, UKM UMMAT	Semua terlibat dengan mengutus perwakilan masing2 NGO dalam setiap rapat koordinasi dan survey lapangan bersama2 dengan anggota kelompok kerja <i>shelter</i> lainnya.	Sangat lancar, pada tahap perencanaan dengan terbentuknya Group Kelompok Kerja <i>Shelter</i> , yang sering raoat yntuk membagi tugas pembangunan <i>shelter</i> dan wilayah kerja biar tidak tumpang tindih. Pada saat pelaksanaan, mengadakan pertemuan dan peningkatan kapasitas relawan maupun penyintas dalam hal <i>shelter</i> . Serta evaluasi dan pengendalian dengan pengisian format 5W 1 H dan melaporkan swcara berkala untuk melihat kesenjangan pembangunan <i>shelter</i> yang dikoordinir oleh IFRC.	Sumber dana : Sumberdana dilakukan dari masing masing pihak/lembaga dengan lokasi dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan tempat pembangunan <i>shelter</i> komunal/mengelompok. 2. Sulitnya terpantau kebutuhan penyintas yang masih tinggal dengan fasilitas seadanya di lokasi reruntuhan rumahnya masing-masing. 3. Bahan dan kualitas <i>shelter</i> tidak bertahan untuk jangka waktu lama sambil menunggu rumah permanannya jadi, diperburuk dengan masuknya musim hujan. 4. Ketersediaan air bersih. 5. Manajemen sampah yang buruk. 6. Drainase limbah yang buruk.
------------	--	---	---	---	--	---	---	--

19/04/2021	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB	Mengkoordinir dengan K/L dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan <i>shelter</i>	Menghindarkan korban dari proses formal (mencegah dan penanganan korban dari kekerasan)	Kementerian Sosial, BNPB, dan Pemerintah Daerah yang paling dominan, dan Lembaga Kemanusiaan	Tidak semua terlibat dalam kepemimpinan , namun terlibat dalam penanganan kemanusiaan	Melalui satu wadah/OPD (dinas sosial/DP3AKB) untuk mempermudah alur dan pertanggungjawabannya (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)	Manajemen : Manajemen pengungsi dilakukan melalui keterlibatan lokal, dengan melakukan pelatihan oleh para tim pengembangan kapasitas dalam manajemen pengungsi (IOM dan kawan kawan)	Pengurus <i>shelter</i> tidak semua mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak
------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	---	--

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan Narasumber Penerima Manfaat

Tanggal Wawancara	Nama Penerima Manfaat	Alamat Penerima Manfaat	Peran Dalam Kolaborasi	Apa anda terlibat dalam Penetapan tujuan Penanganan Shelter Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	Bagaimana menetapkan Tujuan dalam Dalam Penanganan Shelter Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	Apakah anda pernah terlibat dalam kepengurusan kelompok kerja Penanganan Shelter Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?	Apakah anda pernah dimintai pendapat atau diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat kepada para pihak yang terlibat dalam kelompok kerja Penanganan Shelter Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporannya)	Apakah anda menerima atau memberikan bantuan dalam pembangunan Shelter Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB? (uang, bahan, pelatihan/penyuluhan/sosialisasi)	Masalah apa yang ditemukan Dalam Penanganan Shelter Bagi Penyintas Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB?
20/04/2021	Solatiyah	Desa Gendang Bajur	Penerima Manfaat	Terlibat, sebab pendirianan shelter berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri	Shelter dibangun atas inisiatif warga masyarakat, penetapan tujuannya tempat terdekat dengan lokasi pemukiman namun dirasa aman oleh warga.	Ya, terlibat di dapur umum	Pernah dalam pelayanan kesehatan	Menerima bantuan berupa logistik kebutuhan dasar penyintas (sembako, perlengkapan mandi, pakaian layakpakai dll), mendapat penyuluhan psikososial/trauma healing	Pemukiman sementara dimana tenda bocor dan tidak layak, kebutuhan beras dan lauk pauk kadang masih kurang

20/04/2021	Ibu Ida	Jl. Raya Kera Raden (Huntara Opster TNI T.A 2019)	Penerima manfaat (terdampak rumah rusak berat)	Tidak (karena dikoordinasikan oleh Kepala dusun)	Tidak tahu	Tidak (karena dikoordinasikan oleh Kepala dusun)	Dalam pelaksanaan : beberapa NGO datang menanyakan kebutuhan namun tidak terealisasi, dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tidak pernah dimintai pendapat	Menerima bantuan berupa bantuan logistik kebutuhan dasar penyintas (sembako), pelayanan kesehatan dan obat-obatan, penyuluhan dukungan psikososial/trauma healing, sosialisasi evakuasi saat menghadapi bencana	Masalah yang ditemukan : kegiatan pendidikan untuk anak sekolah tidak berjalan (kurang lebih 5 bulan), kesulitan air bersih, penanganan kelompok rentan masih lamban
21/04/2021	Ibu Rumiati	Lingkungan Pengampel Indah	Penerima manfaat (terdampak rumah rusak sedang)	Iya dalam penentuan lokasi (pengungsian merupakan inisiatif masyarakat)	Lokasi dipilih karena terdekat dengan lokasi pemukiman dan dirasa aman	Tidak	Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi: tidak. Pelaporan kepada Kepala Lingkungan	Menerima bantuan berupa : logistik (ssembako, selimut, tikar) pelayanan kesehatan, sanitasi dan limbah oleh pemerintah, sekolah darurat, penyuluhan dukungan psikososial/trauma healing, bantuan untuk kelompok rentan	Tidak ada

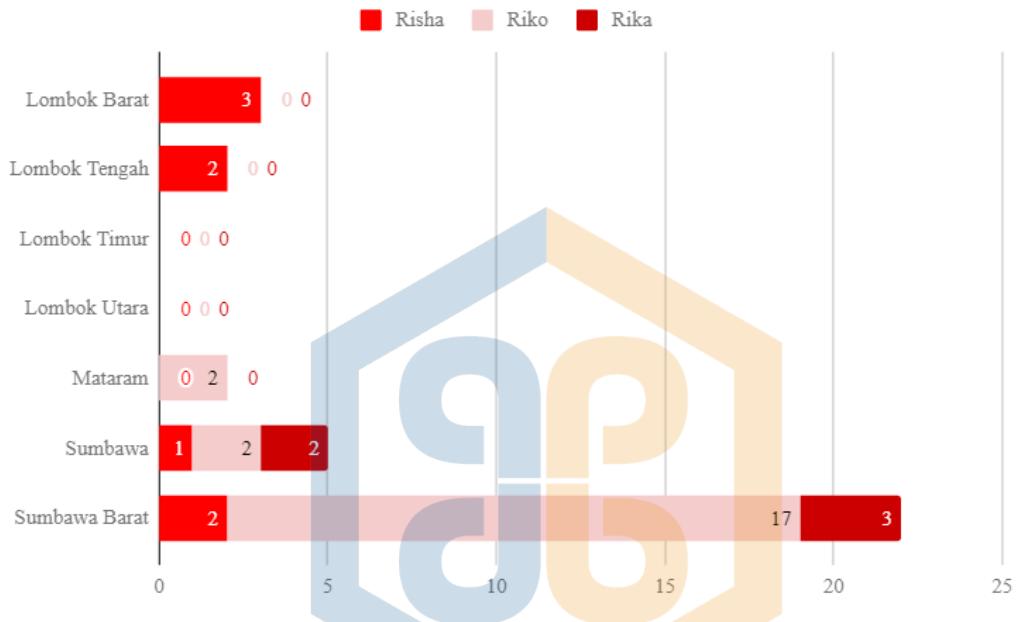
**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

21/04/2021	Bapak Idris	BTN Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram	Penenerima Manfaat	Terlibat, tujuan dari penanganan <i>shelter</i> selain untuk melindungi diri juga saling berbagi dengan penyintas yang lain.	Berdiskusi dengan tetangga	Terlibat terutama dalam pendistribusian makanan, terpal, sembako, pakaian ke daerah yang terdampak lebih parah	Pernah terutama tentang pelaksanaan pembagian bantuan ke daerah yang lebih parah	<i>Shelter</i> di BTN Sweta merupakan swadaya masyarakat sekitar dan malah memberikan bantuan pada lokasi yang terdampak lebih parah	Tidak ada
21/04/2021	Sudi Sudarsana	Desa Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram	Koordinator <i>shelter</i>	Terlibat dengan tujuan <i>shelter</i> untuk menghindari gempa susulan di tempat yang lebih aman atau berlindung.	Bersama dengan warga secara spontan	Ya bersama ketua RT, kepala lingkungan, dan kader posyandu	Ya, pelaporan terkait pelaksanaan dan evaluasi kepada lurah	Ya, berupa sembako, tenda, MCK darurat, sosialisasi pengobatan, trauma helaing, dan sekolah darurat	Keterlambatan kedatangan bantuan di lokasi Bertais. Kota Mataram karena bantuan diprioritaskan ke Lombok Utara dan Lombok Barat
20/04/2021	Ibu Hajjah Marjanah	Lendang Bajur, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	Pusat Dapur Umum <i>Shelter</i> Lendang Bajur	Menetapkan tujuan <i>shelter</i> dengan lokasi <i>shelter</i> yang luas dan aman	Terlibat dalam mengkoordinir dapur umum	Ya, pernah terlibat dalam pusat dapur umum <i>shelter</i>	Pernah terutama dalam manajemen dapur umum	Ya, mendapat uang dari keluarga di luar kota, bahan makanan dari pemerintah dan NGO, dukungan psikososial berupa relawan datang dengan program trauma healing	Ketersediaan air di <i>shelter</i> kurang, pengaturan pembagian bantuan kepada penyintas, kurangnya ketersediaan toilet (hanya ada 1), kualitas <i>shelter</i> menurun saat musim hujan

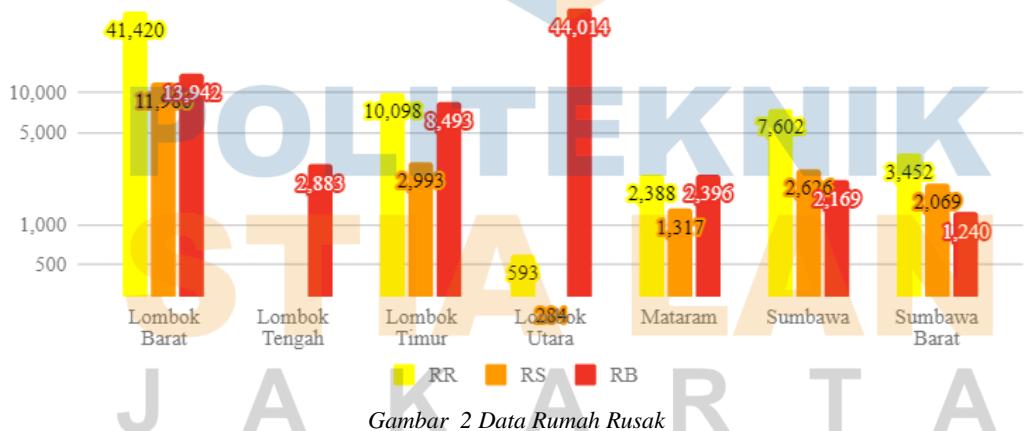
20/04/2021	Bapak Haji Rahmatullah	Gunungsari, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	Penerima Manfaat	Terlibat	Menurut dengan yang dituakan	Ya, mengkoordinir pemuda untuk siaga di shelter	Ya, oleh warga yang berada di shelter dan Pak RT	Mendapat bantuan logistik, shelter, dan sosialisasi oleh relawan	Kebutuhan tidak terpenuhi pada awal masa darurat bencana, kurangnya terorganisir dalam kepengurusan posko, dan permasalahan kesehatan penyintas
20/04/2021	Ibu Zubaidah	Dusun Batu Ampar, Desa Sokong, Kec Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	Koordinator Shelter	Ya Terlibat dalam penetapan tujuan shelter untuk perlindungan dan kenyamanan	Penetapan lokasi yang jauh dari bahaya karena waktu itu terdapat isu tsunami	Terlibat sebagai ketua atau koordinator shelter	Ya, pernah dimintai pendapat. Pelaporan dilakukan kepada Kepala Dusun	Ya mendapat bantuan uang, bahan makanan pokok, kebutuhan dasar, kebutuhan kelompok rentan, toilet darurat dan pasokan air dari BNPB dan trauma healing dari NGO	Sensitivitas dan emosional meningkat, pernah terjadi diare, pada awal tidak ada toilet selama beberapa hari namun kemudian ada bantuan, kurangnya duduk bersama
20/04/2021	Budiawan	Dusun Karanglangu, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kab. Lombok Utara	Pemerintah Desa	Terlibat dalam pemilihan lokasi dan koordinasi pendistribusian bantuan	Koordinasi dengan para kepala dukuh dan masyarakat dengan cepat	Terlibat sebagai kepala desa maupun koordinasi di shelter dusun karang langu	Ya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.	Ya, berupa shelter, sembako, pelayanan kesehatan, psikososial	Konflik penerimaan bantuan, penyakit diare yang menyerang

Lampiran 6 Data Sekunder Telaahan Laporan

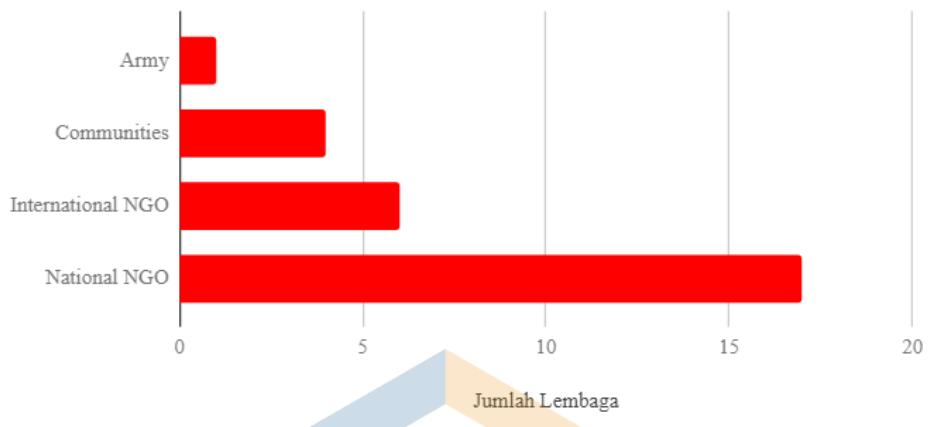
Grafik dan Tabel



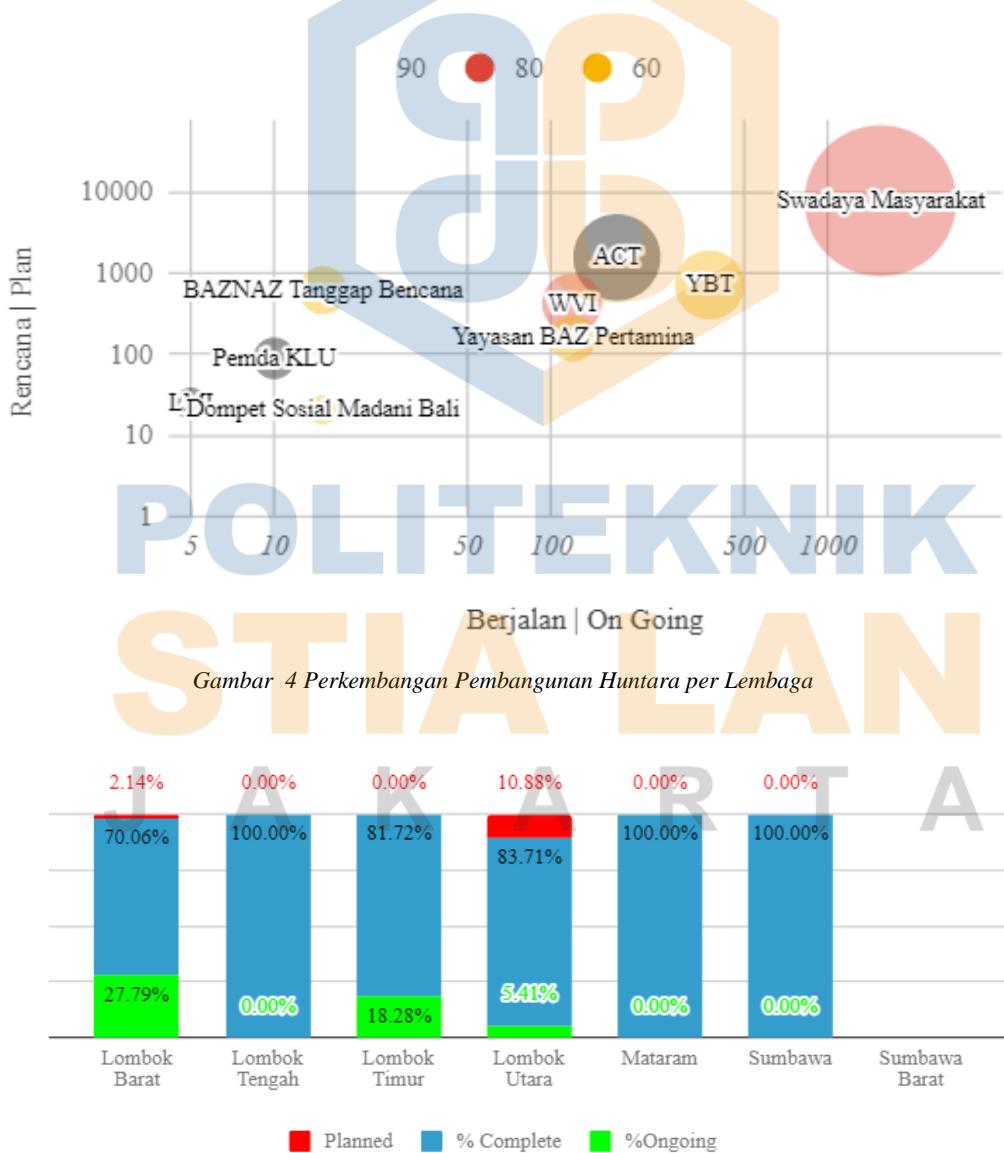
Gambar 1 Data Distribusi Jenis Huntap



Gambar 2 Data Rumah Rusak



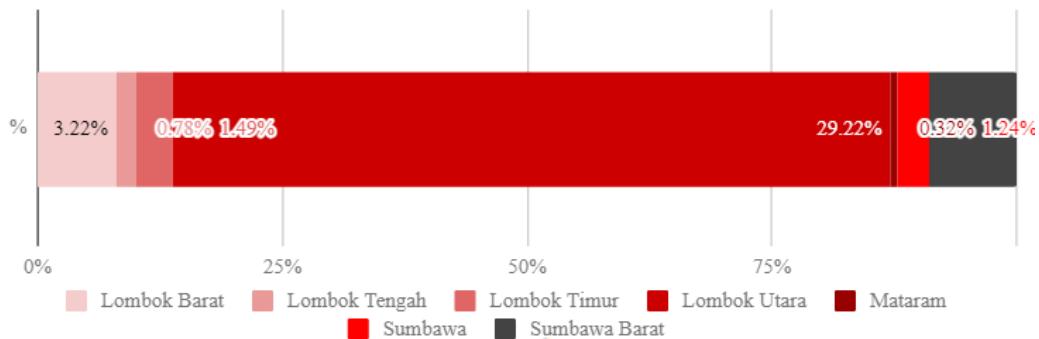
Gambar 3 Jumlah Lembaga yang Berpartisipasi



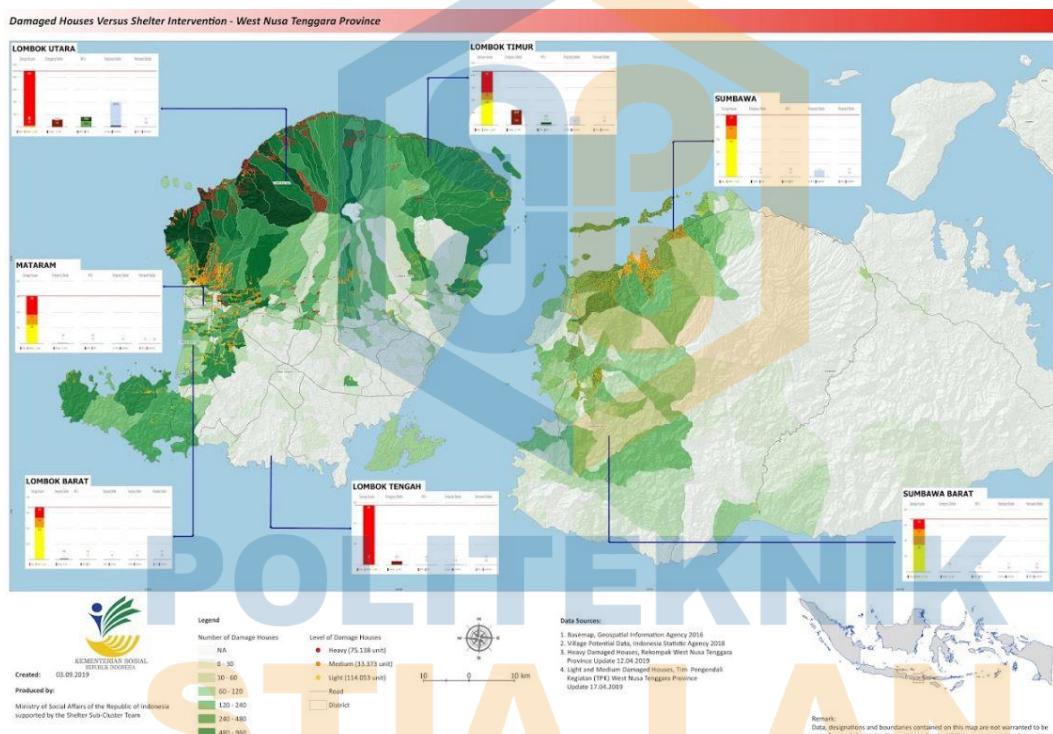
Gambar 4 Perkembangan Pembangunan Huntara per Lembaga



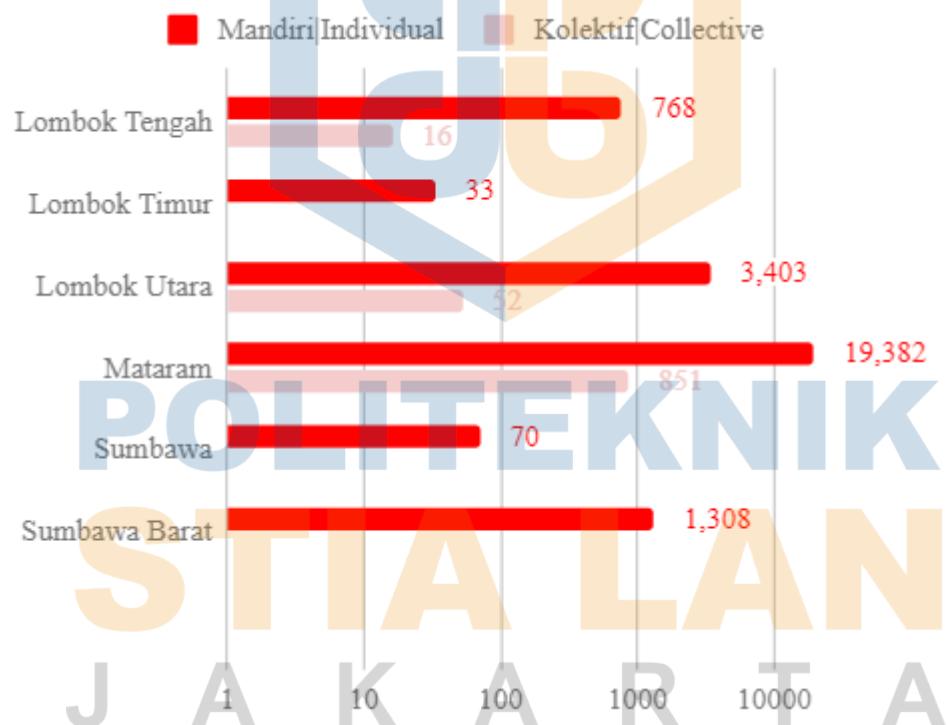
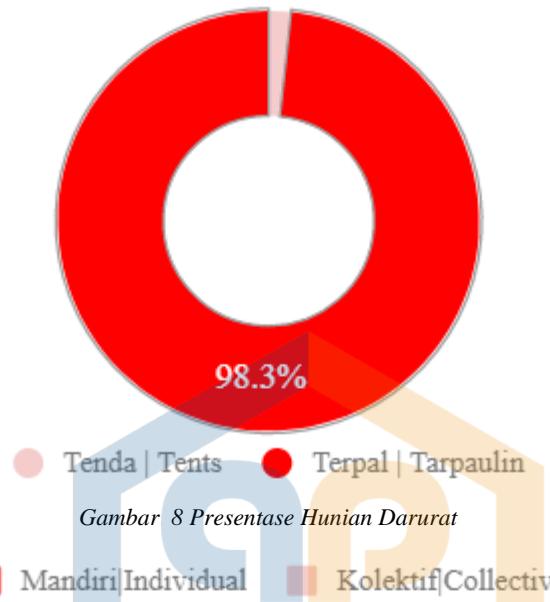
Gambar 5 Perkembangan Pembangunan Huntara



Gambar 6 Presentase Penyintas



Gambar 7 Peta Kesenjangan Bantuan



Gambar 9 Rasio Huntara Kolektif dan Individu

Partisipasi Lembaga Pembangun *Shelter*

No	Pelaksana	Rencana	Didanai	Sedang	Selesai	Progress
1	LAZ Dasi NTB	148	148	0	148	100
2	Karina Indonesia	206	206	0	206	100
3	PGI NTB	100	100	0	100	100
4	BAZNAZ Tanggap Bencana	619	177	15	162	91,53
5	Yayasan BAZ Pertamina	160	160	120	40	25
6	PKPU	453	403	0	403	100
7	Forum Santri Nasional	86	86	0	86	100
8	Komunitas Pendaki Gunung	600	600	0	600	100
9	Kwarnas Pramuka Peduli	180	180	0	180	100
10	Dompet Sosial Madani Bali	21	21	15	6	28,57
11	DT Peduli	80	80	0	80	100
12	PPPA DAQU bersama PARFI	86	86	0	86	100
13	LAZ Harfa	20	20	0	20	100
14	Dhiaul Fikri Charity	196	196	0	196	100
15	APU	22	22	0	22	100
16	Tangan Di Atas	21	21	0	21	100
17	Rumah Zakat	445	445	0	445	100
18	LMI	25	25	5	20	80
19	Ponpes As Sunnah Abu Hurairah	98	98	0	98	100
20	IRB	155	155	0	155	100
21	MDMC	413	413	0	413	100
22	Perseorangan	94	94	0	94	100
23	FMMB Tangerang Selatan	10	10	0	10	100
24	Rumah Tangguh AA Gym	250	250	0	250	100
25	Yahfa Peduli Lombok	10	10	0	10	100
26	Forum Medan	208	208	0	208	100
27	Forum Mahasiswa Jogja	45	45	0	45	100
28	Swadaya Masyarakat	7846	6500	1550	4950	76,15
29	Darul Quran	74	74	0	74	100
30	HMI Mataram	11	11	0	11	100
31	SUKMA	2	2	0	2	100
32	PT Kampung Bahagia	35	35	0	35	100
33	PT Autore Pearl Culture	370	370	0	370	100
34	DD	159	159	0	159	100
35	BMH	13	13	0	13	100
36	YKMI	455	455	0	455	100
37	ACT	1573	1464	173	1291	88,18

38	KAMMI	3	3	0	3	100
39	BUMN	314	314	0	314	100
40	Annas Indonesia	8	8	0	8	100
41	PMI	156	109	0	109	100
42	UGM	21	21	0	21	100
43	IDI	5	5	0	5	100
44	NU Peduli	884	803	0	803	100
45	Hotel tugu	964	964	0	964	100
46	YBT	718	718	374	344	47,91
47	Rebana	23	23	0	23	100
48	Pemda Sumbawa	1140	1140	0	1140	100
49	HILMI	10	10	0	10	100
50	Global Peace Malaysia	6	6	0	6	100
51	Yayasan Al Ahzar	97	97	0	97	100
52	TNI	26	26	0	26	100
53	PT SHARP	30	30	0	30	100
54	Pemdes	2378	2330	0	2330	100
55	NH	125	125	0	125	100
56	Rumah Seyum	20	20	0	20	100
57	TMY	40	40	0	40	100
58	FPI	16	16	0	16	100
59	RDN	7	7	0	7	100
60	Laznas NTB	4	4	0	4	100
61	USU	33	30	0	30	100
62	API	40	40	0	40	100
63	BPBD	982	982	0	982	100
64	UNDIP	138	80	0	80	100
65	Forum Persatuan Tanah Datar	22	22	0	22	100
66	BI	446	446	0	446	100
67	Rotary	120	120	0	120	100
68	IDERU	150	150	0	150	100
69	BPBD dan Swadaya Masy	25	25	0	25	100
70	OBOR berkat Indonesia	60	60	0	60	100
71	Yayasan Bersama Umat	2	2	0	2	100
72	Yayasan Abdurahman Bin Auf	1	1	0	1	100
73	Yayasan Rumah Sedekah	1	1	0	1	100
74	FKAM	7	7	0	7	100
75	LAZIS Wahdah	2	2	0	2	100
76	Komunitas Surfing	1	1	0	1	100
77	ITS	7	7	0	7	100

78	Hilal Ahmar	1	1	0	1	100
79	Rela Baik	1	1	0	1	100
80	Muslim Bersaudara	2	2	0	2	100
81	Yayasan Seribu Senyum	4	4	0	4	100
82	Posko Babe Jenggala	236	236	0	236	100
83	Yayasan Al Quran	15	15	0	15	100
84	PKS	126	126	0	126	100
85	Media Group	384	384	0	384	100
86	Bank Malaysia	4	4	0	4	100
87	Persis	2	2	0	2	100
88	AQL Berkah Berjamaah	20	20	0	20	100
89	Indonesia Bangkit	23	23	0	23	100
90	IZI	15	15	0	15	100
91	YWMI	80	80	0	80	100
92	PPA	12	12	0	12	100
93	Hotel medana	20	20	0	20	100
94	ADRA	585	585	0	585	100
95	Yayasan Puter	3	3	0	3	100
96	Al Irsyad	307	307	0	307	100
97	Bank Muamalat	150	150	0	150	100
98	YDSF	10	10	0	10	100
99	Bale Bule	48	48	0	48	100
100	BAKRIE	100	100	0	100	100
101	Yayasan DP Peduli	80	80	0	80	100
102	Yayasan Al Saufa	15	15	0	15	100
103	KMJ	1320	1320	10	1310	99,24
104	United Tractor	100	100	0	100	100
105	Pemda KLU	90	90	10	80	88,89
106	Yayasan Endri Foundation	3	3	0	3	100
107	Yayasan Kasih Ibu	20	20	0	20	100
108	Rodja TV	14	14	0	14	100
109	Yayasan Peduli Kemanusiaan	20	20	0	20	100
110	MMC	40	40	0	40	100
111	WAMI	4	4	0	4	100
112	Tagana	80	80	0	80	100
113	ACS	22	22	0	22	100
114	PMMA	292	292	0	292	100
115	PT PLN	15	15	0	15	100
116	Dishub	3	3	0	3	100
117	BRI	259	121	0	121	100

118	Pertamina	626	293	0	293	100
119	Pemprov DKI	15	15	0	15	100
120	Balai Bangkit	10	10	0	10	100
121	Habitat For Humanity	87	87	0	87	100
122	WVI	426	426	119	307	72,07
TOTAL		30.010	27.355	2.391	24.964	83.18



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan Wawancara dan FGD



Gambar 10 Wawancara dengan Informan dan Narasumber Kunci dengan HFI



Gambar 11 Wawancara dengan Informan dan Narasumber Kunci dengan MDMC



Gambar 12 Dokumentasi Wawancara dengan Kalaksa BPBD Prov NTB

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA



Gambar 13 Dokumentasi wawancara dengan narasumber penerima manfaat di Kabupaten Lombok Barat



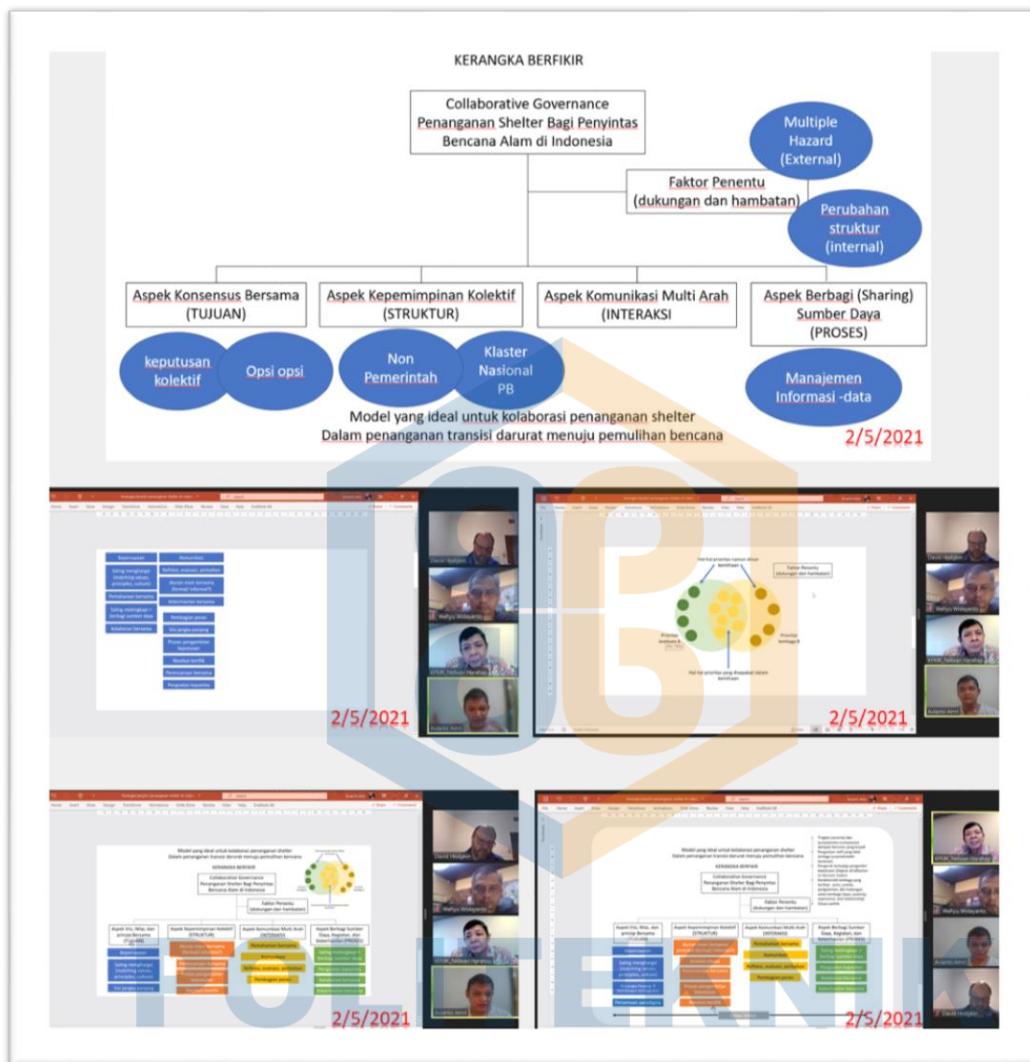
Gambar 14 Dokumentasi wawancara dengan narasumber kunci Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB



Gambar 15 Dokumentasi wawancara dengan narasumber penerima manfaat di Kabupaten Lombok Utara



Gambar 16 Dokumentasi wawancara dengan narasumber penerima manfaat di Kota Mataram



Gambar 17 Dokumentasi FGD dengan Pakar Penanganan Shelter, masing-masing Dr. David Hodgkin (IFRC), Dr. Avianto Amri (Pakar Manajemen Shelter), Wahyu Widayanto Klaster Nasional Penanganan Pengungsi dan Perlindungan Sosial) tanggal 2 Mei 2021, melalui Aplikasi Zoom Meeting..

J A K A R T A

Lampiran 8 Telaahan Dokumen



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 3 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 FAKSIMIL : 021-3843768

SITUS : <http://www.kemenkoen.go.id> --- e-mail : informasi@kemenkoen.go.id

Jakarta, 20 September 2018

Nomor : 235 /UND/DEP.I/KSB.01.00/09/2018

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Rapat Klaster Nasional Pengungsi dan
Perlindungan

Kepada Yth.

(daftar terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Rapat Klaster Nasional Pengungsi dan Perlindungan, bersama ini
dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 24 September 2018

Waktu : 09.00 WIB – 16.00 WIB

Tempat : Ruang Ballroom 2, Hotel Harris Vertue
Jl. Hayam Wuruk No. 6, Jakarta Pusat

Pimpinan Rapat : Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan
terimakasih.

Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana,


Joko Widodo

Tembusan Yth. :

Deputi I Kemenko PMK (sebagai laporan)

Lampiran Surat
Nomor : /UND/DEP.I/KSB.01.00/09/2018
Hal : Undangan Rapat

DAFTAR UNDANGAN

1. Direktur Penanganan Pengungsi, BNPB
2. Direktur Perbaikan Darurat, BNPB
3. Direktur Linjamsos, Kemensos
4. Direktur PSKBA, Kemensos
5. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Kepala Dinas Sosial, Prov. NTB
7. Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PMK
8. Kabid Pemulihan, Kemenko PMK
9. Kepala Bidang Penanganan Pengungsi, Kemenko PMK
10. IOM
11. HFI
12. FozNas
13. MDMC
14. IFRC
15. WiFi
16. OXFAM
17. UNICEF
18. Pelaksana di Asdep Tanggap Cepat Bencana
19. Pelaksana di Asdep Penanganan Pasca Bencana

Gambar 18 Undangan Rapat Klaster Nasional Pengungsi dan Perlindungan di Kemenko PMK

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Notulensi
Pertemuan PMK dan NGO

Tanggal : 24 September 2018
Waktu : 09:00 – 16:00
Tempat : Ballroom 2, Harris Vertue Hotel

Peserta : **terlampir**
Fasilitator : Tetrie Darwis - Kemensos
Notulensi : Hakim - IOM

Agenda :

1. Pembukaan oleh Asdep PMK (Pak Joko)
2. Arahan Deputy PMK
3. Sambutan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB
4. Sambutan Direktur Perbaikan Darurat BNPB
5. Sambutan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
6. Pengantar Diskusi oleh Pak Nelian
7. Inventarisasi Kegiatan WASH dan Shelter NGO yang hadir
8. Diskusi tentang Kendala dan Tantangan
9. Kesimpulan

Proses dan Hasil Pertemuan:

A. Pembukaan

1. Sambutan Plt Deputi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK
 - a. Ucapan terima kasih untuk Kemensos yang telah mengawali Klarifikasi Pengungsi dan Perlindungan yang dilakukan oleh NGO dan I-NGO, khususnya yang sudah beraktivitas di NTB;
 - b. Bagaimana NGO sudah bergerak terlebih dahulu dibandingkan K/L karena lebih mudah dan tidak birokratis;
 - c. Setelah dengan NGO direncanakan akan ada pertemuan dengan BUMN dan Dunia Usaha untuk mengisi Gap kebutuhan termasuk kerja samanya;
 - d. Akan diadakan Rapat Koordinasi Teknik Tingkat eselon satu di PMK pada hari Rabu 26 September 2018, tentang kemungkinan penggunaan APBDes untuk percepatan Rehab Rekon Pascabencana;
 - e. Sut Hantara bisa untuk dua KK (yg sdh dibuat oleh NGO);
 - f. Diharapkan hantara untuk dapat menjadi Hantap;
 - g. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak termasuk dari mitra NGO dan I-NGO;
 - h. Target Pemerintah yang harus kita perhatikan adalah bahwa sampai akhir Desember 2018 fungsi pelayanan dasar dan ekonomi sudah kembali normal;
 - i. Jika dari NGO ada yang akan membantu membuat sekolah, puskesmas sangat diblehkan;
 - j. Koordinator Rehab Rekon adalah PMK, sehingga dapat mengkoordinasikan semua pihak termasuk NGO dan Dunia Usaha;
2. Sambutan dari Kepala Dinas Sosial NTB
 - a. Sampai saat ini sudah ada 3000 orang yang terkena malaria;
 - b. Diperlukan hantara minimal 100.000 Hantara;
 - c. Membangun titik shelter yang disepakati oleh desa dan NGO;
 - d. Soal HUNATAP, ada 1.239 KK yang sudah terima rekening;
 - e. Kiranya NGO Internasional secara selektif dapat masuk ke NTB;

3. Sambutan dari Direktur Perbaikan Darurat BNPB. (Bapak Medi)
 - a. Data yang menjadi penting, agar tidak salah mengambil keputusan;
 - b. Permasalahan fokus di Hantara dan diukur masih ada perbedaan data dalam hal ini;
 - c. Mapping yang tingkat data untuk hantara;
 - d. Ada 2900 titik pengungsian, apakah komunal, individu atau bagaimana ?
 - e. Diharapkan dibuat data **day by day** untuk hantara;
 - f. Masyarakat terdampak bencana yang sudah memiliki rekening berjumlah 5000 an;
 - g. Jumlah Hantara yang sudah terbangun sampai saat ini masih sangat kecil sekali karena perlu akuntabilitas;
 - h. Pembangunan Hantara atapun Hantara harus di sinergikan dengan WASH, Logistik dsb;
 - i. Estimasi sekitar 40% hantara selesai, memerlukan 60% untuk Hantara;
 - j. Pos Hantara dan Shelter yang ada WASH dan BNPB;
 - k. Pengorganisasian akan dilakukan kembali, kami memastikan peran Pemda untuk selalu berada di depan. Pemerintah Daerah Kabupaten tetap di "depan", nasional mendukung untuk hal tsb.

L. Mapping menjadi sangat penting:
m. Pengungsi, infrastruktur dan ekonomi menjadi satu;

n. Kata Hantara, Fasos, Fasum dan Pelayanan Pendidikan, tidak boleh berhenti;

o. Pemberdayaan Masyarakat jangan dilupakan;

p. Desa Tangguh Bencana menjadi destinasi wisata, bisa dikembangkan;

q. Pemerintah mengajak ke Hantara, hari ini Rumah Transisi, melayani pengungsi masih harus tetap dijalani;

4. Sambutan dari Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Bapak Margoyono)

- a. Bagaimana berkolaborasi dengan banyak pihak sejak awal gempa terjadi;
- b. Kemensos telah mengelontarkan dana sejumlah 237 Miliar;
- c. Mapping ke depan seperti apa ?;

d. Apa yang sudah ada apa yang akan dilakukan oleh NGO untuk NTB;

e. Data di Kemensos bukan untuk rival, tetapi sebagai bahan sinergi saja dengan semua pihak;

f. Deputy PMK sangat mengharapkan untuk kolaborasi ini;

5. Pengantar Diskusi Pak Nelian Harahap, Kemenko PMK

a. Pembangunan Hantara dan WASH merupakan bagian integral dari proses peanggaran darurat bencana dan transisi penanganan darurat menjadi pemuliharaan pascabencana yang dilakukan oleh BNPB;

b. Masing-masing lembaga boleh membangun Hantara sesuai dengan kesanggupan pembiayaan namun sedapat mungkin jangan terlalu jauh kesenjangan hasil hunian sementara yang dibangun agar tidak menimbulkan kesenjangan dimasyarakat korban bencana;

c. Mengenai pemanaungan hunian yang dibangun silakan disesuaikan dengan nomenklatur program di masing-masing lembaga, namun hasil akhirnya nanti akan dihitung oleh pemerintah sebagai laporan pelaksanaan penanggulangan transisi darurat menuju pemuliharaan pascabencana dengan sebutan "Hunantap".

d. Diharapkan agar seluruh pihak pemangku hantara dan Hantara dan WASH pada kesiagaan bumi di Lombok ini dapat menjadi *Role Model* untuk penanggulangan bencana selanjutnya;

e. BNPB diharapkan segera menyelesaikan verifikasi dan membuat Peta persebaran Rumah Rusak yang akan dibantu HUNATAP oleh Pemerintah, untuk dijadikan panduan pembangunan Hantara dan WASH sebagai kelengkapan dari Hantara, melalui pendanaan Non APBN (partisipasi NGO dan Dunia Usaha);

f. Peran dari mitra (NGO dan Dunia Usaha), tetapi kita buka "ruang" untuk berkontribusi baik dalam penanganan transisi darurat menuju pemuliharaan maupun untuk peanggaran Rehab-rekon pascabencana. Tentang bantuan pendanaan dari mitra, melalui kerjasama dengan NGO Nasional/Lokal, akan dibahas lebih lanjut di kesiagaan bumi yang akan di inisiasi oleh PMK, mengenai prosedur dan mekanisme kerja samanya;

g. Dampak positif dari pendirian Hantara diantaranya: 1)ada pemberdayaan masyarakat (pemanfaatan produk lokal), membangun gotong royong yang sesungguhnya termasuk dunia usaha, 2)Meningkatnya pemanfaatan potensi lokal (tenaga dan bahan-bahan setempat); 3)Peningkatan kapasitas masyarakat disamping proses pemuliharaan;

B. Diskusi

1. Diskusi dipandu oleh Tetrie Darwis – Kemensos, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Rapat hari ini meneleksan kepada inventarisasi WASH dan Hantara yang masih dilakukan oleh sebagian NGO dan I-NGO (Lembaga dan Stasiun televisi) dan dilakukan oleh masyarakat lokal yang dilakukan untuk setiap mitra yang serta sejalan ini "mengelabuhi" konsep definisi hantara yang sangat beragam dari NGO yang melakukan aktivitas ini;
 - b. Data Hantara dan WASH diharapkan lengkap yang terdiri atas: jumlah, lokasi, waktu (yang sudah disesuaikan, yang sedang disesuaikan, yang sudah disesuaikan);
 - c. Memperbaiki definisi operasional Hantara, **terlampir**;
 - d. Diharapkan ada pendampingan dan arahan dari PU terkait pembuatan Hantara agar efektif dan efisien untuk dapat ditingkatkan menjadi Hantap;

2. Rekomendasi

- a. Pemerintah memastikan ketersediaan material dengan harga yang stabil;
- b. Ketersediaan sumberdaya manusia/tukang lokal dapat dipastikan;
- c. Jika BUMN akan terlibat, mungkin perlu diatur pembagian peran terkait pembiayaan SDM – Material;
- d. Pelibatan pengusaha lokal untuk pengeradaan dan lainnya yang mendapat rekomendasi dengan hasil akhirnya yang lebih terkontrol dan kompetitif;
- e. Dukungan terkait transportasi (orang dan barang) dan alat berat termasuk stok bahan baku. Kemungkinan dukungan dari BUMN – TN – swasta.
- f. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota terdampak bencana agar melakukan pembinaan kelompok usaha lokal untuk menjadi mitra penyediaan bahan bangunan local dan pengerahan tenaga kerja dalam rangka percepatan pembangunan rumah transisi, Wash dan stabilisasi harga bahan kebutuhan.

Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Rapat
Asdep Tanggap Cepat Bencana Kemenko PMK

Joko Yoewono

Gambar 19 Notulensi Rapat Kemenko PMK dengan NGO



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 004/13 - 005 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI NTT
UNTUK TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DAN PERCEPATAN REHABILITASI
REKONSTRUKSI PASCA GEMPA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap situasi dan kondisi pengamanan masa tanggap darurat yang telah dinyatakan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2018;
 - b. bahwa untuk keberlanjutannya, diperlukan upaya pengamanan kedaruratan pada masa transisi ke pemulihian dan percepatan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi NTT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam halaman 16, perlu diambilkan Keputusan Pemerintah Provinsi NTT untuk Transisi Darurat ke Pemulihian dan Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Gempa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 164);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 475;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559 sebagaimana telah diubah berulang kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829;

KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

- Menetapkan
KESATU
- KEDUA**
- MEMUTUSKAN** :
- 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok, dan Wilayah Terdampak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pengamanan dan Siap Pakai pada Status Keaduan Darurat Bencana;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2014 Nomor 9).
- Memperhatikan :
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengamanan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 - 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pengamanan dan Siap Pakai pada Status Keaduan Darurat Bencana;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2014 Nomor 9).

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT, Panglima Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD) dan Kepala BNPB.
- ii. Struktur Organisasi dan rincian tugas komponen Sekretariat Bersama Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- iii. Segala biaya yang dikeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini ditanggung pada APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 yang tersedia pada BPBD Provinsi NTT dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- iv. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

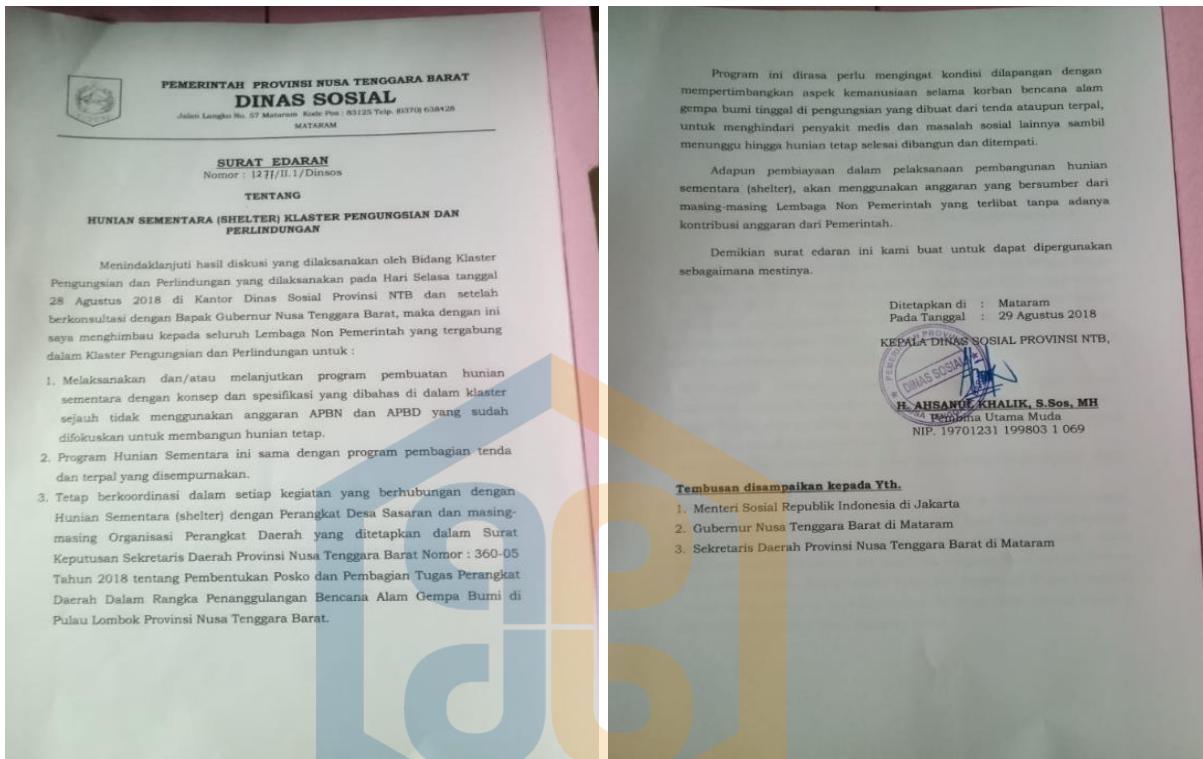
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Agustus 2018.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

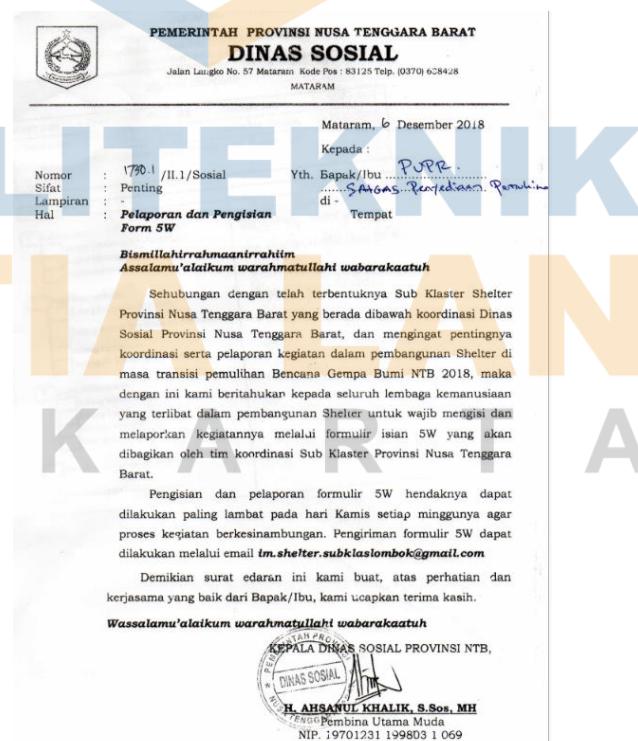
M. ZAMMIUD MAJDI

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

Gambar 20 Pergub NTT tentang pembentukan sekretariat bersama



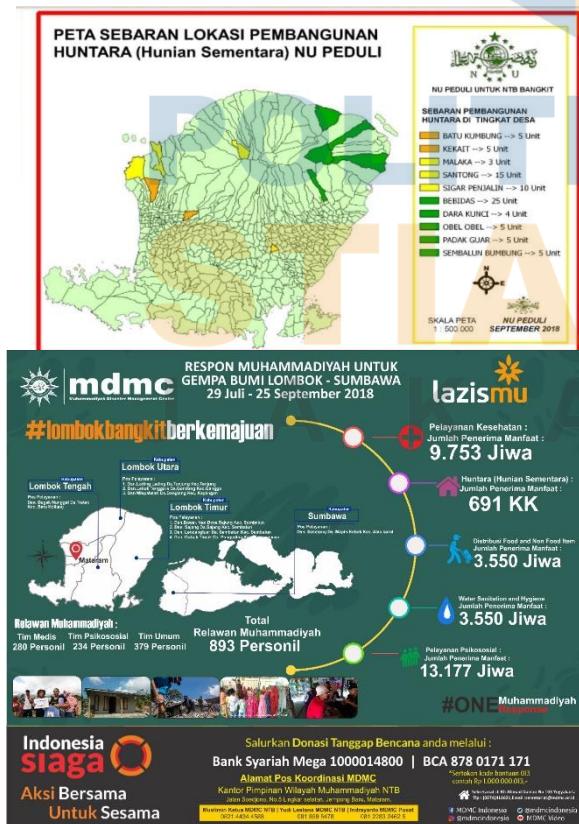
Gambar 21 SE Dinsos tentang Shelter Klaster PP



Gambar 22 Surat Pelaporan dan Pengisian 5W dari Dinsos NTB kepada PUPR



Gambar 23 Pembangunan Huntara di Kampung Senumpang



Gambar 24 Sebaran Pembangunan Huntara oleh beberapa NGO

Lampiran 8 Dokumentasi Hasil Rapat Koordinasi Multipihak Penanganan Shelter di Lombok, NTB



Notulensi Rapat Sub Klaster Shelter Minutes of Meeting – Sub Cluster Shelter

<ul style="list-style-type: none"> Solusi yang ditawarkan supply asbes atau keramik. Diharapkan pemerintah hanya menyuplai kekurangan tanpa menghilangkan apa yang telah dibangun. ACT aktif membantu di Desa Lingsar. Bantuan berupa Huntara, ATK, tenda, dan sumur bor. <p>Mba Icha, Arsitektur Komunitas</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsep rumah yang akan dibangun belum diputuskan mengingat pemerintah akan membangun huntag segera. Salah satu solusi yaitu konsep rumah tumbuh. Kriteria rumah tumbuh perlu diketahui dan memiliki standarisasi. 			
PERTEMUAN SELANJUTNYA		RENCANA TINDAKAN LANJUT	
Hari, Waktu, dan Tanggal	Agenda	Peserta	
Jumat, 22 Februari 2019 jam 15.30 di Dinsos Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Info terkini dari koordinator sub klaster Shelter Info terkini dari tim pendukung koordinasi sub klaster Shelter Info terkini dari kelompok kerja (SAG, TWIG) Info terkini dari tim Manajemen Informasi (5W, daftar kontak lembaga) Topik-topik penting lainnya Urusan lainnya 	<p>Anggota sub klaster shelter untuk Klaster PP di NTB</p> <p>Undangan dari Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Barat c.q. PSKBA</p>	
PERTEMUAN BERAKHIR		NAMA	LEMBAGA
Jam: 17.30	Tim Sub Klaster Shelter		IFRC

Folder, Dokumen, dan Kontak Penting	Info Detail
Untuk mengirimkan formulir 5W	Email ke: im.shelter.subklasnas@gmail.com
Formulir 5W dapat diunduh di	https://drive.google.com/file/d/1WmeEAP6dJM9Dv8uTbwK8iLt2yggSRtgN/view?usp=sharing



International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies

Halaman 3 dari 5



Notulensi Rapat Sub Klaster Shelter

Minutes of Meeting – Sub Cluster Shelter

<ul style="list-style-type: none">Tim sub klaster Shelter melakukan kunjungan ke Desa Sade untuk melihat Rumah Adat Sasak sebagai bahan terkait standar Hunian		
Topik Penting Lainnya <ul style="list-style-type: none">Pecahan-pecahan atau sisa runtuhan bangunan setelah gempa menjadi sarang dan tempat potensi berkembang biak nyamuk. Hal ini mampu meningkatkan potensi malaria di daerah bencana.Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan karena sulitnya pengumpulan data dari berbagai Lembaga.Penyediaan NTB Satu Data oleh Bappeda untuk mendapatkan info terkini terkait data dari berbagai klaster tentang kondisi terkini kebencanaan dan penanggulangannya.Pertemuan dilakukan setiap minggu pada hari Jumat sore pukul 15.30.Konsep rumah tumbuhPrinsip-prinsip hunian dari berbagai persepektif seperti adat, agama, gender, disabilitas.PMI memberikan bantuan melalui voucher atau Bantuan Non Tunai		
Pak Lois, Karina <ul style="list-style-type: none">Ketersediaan air terbatas di Dusun Torean, Dusun Tanjung Biru, dan Dusun Lendang Lokok Re, masing-masing di Desa Lolan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara.Mata pencaharian yang menurun karena hasil perkebunan juga hancur setelah gempa.		
Pak Thrio Andika, Al-Irsyad <ul style="list-style-type: none">SDM lokal biayanya lebih mahal daripada dari luar Lombok.Kurangnya rasa gotong royong sehingga harus memasukkan tukang dari luar Lombok.		
Pak Rama, Masyarakat Lokal dan Relawan <ul style="list-style-type: none">Indikasi kecemasan warga karena posisi hutan di atas fondasi masing-masing karena lahan mereka tidak luas. Pembongkaran hutan yang layak menjadi isu saat ini untuk menerima pembangunan hutan.Solusi yang ditawarkan terkait material berbahan asbes atau keramik. Diharapkan pemerintah hanya menyediakan kekurangan tanpa menghilangkan apa yang telah dibangun.		
Pak Mahdi, Relawan Desa Lingsar		



International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies

Halaman 2 dari 5



Notulensi Rapat Sub Klaster Shelter

Minutes of Meeting – Sub Cluster Shelter

** For English version, please scroll below **

NOTULENSI RAPAT	SUB KLASTER SHELTER	Tanggal: 15 Februari 2019 Jam: 15.30 – 17.30			
Lokasi	Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat				
Peserta	Daftar Peserta terdapat di daftar kontak: http://bit.ly/daftarkontakshelter				
Agenda Pertemuan	1. Info terkini dari tim pendukung koordinasi sub klaster Shelter 2. Info terkini terkait Manajemen Informasi 3. Info terkini dari tim SAG 4. Topik-topik penting lainnya				
AGENDA		RENCANA TINDAK LANJUT			
Topik		Siapa	Kapan		
Info terkini dari Tim Pendukung Koordinasi Sub Klaster Shelter:	<ul style="list-style-type: none">Tujuan pertemuan adalah sebagai koordinasi bersama dan berbagi data terkiniAda peserta baru dalam rapat koordinasi kali ini yaitu Karina, Al-Irsyad, Perwakilan Masyarakat Desa, dan Komunitas Arsitek IndonesiaKoordinasi lebih lanjut dibutuhkan di tingkat kabupaten mengenai kondisi Huntara yang sudah dibangun oleh organisasi-organisasi termasuk sinkronisasi dengan proses pembangunan huntrap dari pemerintah, sehingga direncanakan ada koordinasi di tingkat Kabupaten dengan KADIS Sosial, dimulai dengan Kabupaten Lombok Utara	Irvan dan Kadis Sosial Kab Lombok Utara	Ditentukan kemudian		
Info terkini dari Tim Manajemen Informasi	<ul style="list-style-type: none">Terdapat 10 lembaga yang aktif di NTB dan memasukkan data 5W.Status hunian sementara: yang sudah selesai dibangun sejumlah 12.879 unit dan sedang dibangun sejumlah 1.090 unit.				
Terdapat beberapa info terkait manajemen infomasi terkait Shelter diantaranya:	<ul style="list-style-type: none">Bebberapa LSM Lokal yang terlibat Huntara, diantaranya Gema Alam dan Futura, sudah dikirimkan form 5w untuk diisi, namun belum mengirimkan kembali form yang sudah diisi. Selain itu terdapat organisasi lain seperti KARINA Indonesia dan PGI yang sudah mengirimkan kembali datanya ke Tim IM ShelterPertemuan dengan Bapeda Prov NTB beserta UNDP membahas NTB Satu Data akan dilanjutkan Kamis depanMasa tanggap darurat diperpanjang hingga 12 April.				



International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies

Halaman 1 dari 5



Notulensi Rapat Sub Klaster Shelter
Minutes of Meeting – Sub Cluster Shelter

Tim Pendukung Koordinasi Sub Klaster Shelter	
Koordinator Tim Pendukung Sub Klaster Shelter Wahyu Widayanto / IFRC HP: 081973752971 E: coord1.shelter.subklasnas@gmail.com	Koordinator Manajemen Informasi Hijaz Jalil / IFRC HP: 08116112880 email: im.shelter.subklasnas@gmail.com
Penasehat Teknis Dave Hodgkin / IFRC HP: 081392099666 E: dave.hodgkin@gmail.com	Koordinator Komunikasi Avianto Amri / IFRC HP: 08552106610 email: Avianto.amri@gmail.com



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA



International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies

Halaman 4 dari 5